

Laporan Penelitian

**POTENSI PENGGUNAAN SUKU, AGAMA, RAS,
DAN ANTAR GOLONGAN DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018**



BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017

TIM PENYUSUN

Pengarah

1. Abhan
2. Mochammad Afifuddin
3. Ratna Dewi Pettalolo
4. Fritz Edward Siregar
5. Rahmat Bagja

Pembina

Gunawan Suswantoro

Penanggung Jawab

Ferdinand Eskol Tiar Sirait

Ketua Tim

Feizal Rachman

Wakil Ketua

1. R. Alief Sudewo
2. Fathul Andi Rizky Harahap
3. Djoni Irfandi

Penyusun

1. Masykurudin Hafidz
2. Nugroho Noto Susanto
3. M. Zaid
4. Muhammad Ihsan
5. Deytri Aritonang

Sekretariat

1. Adriansyah Pasga Dagama
2. M. Qodri Imaduddin
3. Anjar Arifin
4. Ira Sasmita

SAMBUTAN

Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang kuat, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu yang muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Secara historis kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana agar laporan pengawasan dapat lebih tajam secara analitis dan efektif berdasarkan fokus potensi pelanggaran dan kerawanan dan dapat memberikan penindakan dalam upaya memberikan efek jera bagi upaya dan pelanggaran sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai.

Bawaslu hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapapun. Termasuk di antaranya penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran. Terlebih jika integritasnya tidak cukup baik, tentu mereka tidak akan mampu menghadapi godaan dari berbagai pihak di tengah kompetisi pemilu.

Harapan masyarakat terus meningkat atas peran dan kiprah Bawaslu. Bukan karena ketidakmampuan Bawaslu menindak pelanggaran, akan tetapi peningkatan harapan itu juga dipengaruhi makin “canggihnya” modus dan bentuk pelanggaran serta kompetisi pemilu yang mulai tidak sehat, terutama penggunaan kampanye negatif di media sosial, maraknya ujaran kebencian terhadap pasangan calon, dan politik identitas yang makin menguat dan telah membeda-bedakan masyarakat dalam pilihan politik dan keyakinan.

Bawaslu periode 2017-2022 berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui pengawasan yang

lebih mendorong partisipasi masyarakat karena sejatinya Bawaslu harus bekerja bersama seluruh elemen bangsa untuk mengawasi dan menegakkan hukum pemilu secara tegas dan adil. Keadilan pemilu dapat diwujudkan bila Bawaslu bekerja secara terbuka, akuntabel, dan berintegritas.

Dalam melakukan pencegahan sekaligus menyusun strategi pengawasan yang tepat, Bawaslu melakukan sejumlah kajian dan penelitian bagaimana potensi pelanggaran dapat dipotret dengan tepat. Bagian Analisis Potensi Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu sebagai dapur kajian melakukan penelitian sejauh mana potensi timbulnya penggunaan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam proses pelaksanaan Pilkada 2018. Sejumlah pendapat dan pengalaman yang dihasilkan dari penelitian ini ditujukan untuk mencari format pengawasan yang tepat dan model pencegahan yang optimal dalam menanggulangi penyalahgunaan isu SARA dalam Pilkada.

Ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah menghasilkan dokumen ini untuk dapat dinikmati para pembaca sekalian. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh narasumber di daerah penelitian, tim penulis, editor, dan seluruh staf sekretariat Bawaslu. Semoga kehadiran buku ini menambah kekayaan penelitian dan pengalaman dalam proses pengawasan pemilu di Indonesia.

*Bersama rakyat kita
awasi Pemilu, Bersama
Bawaslu kita tegakkan
keadilan Pemilu*

A B H A N
Ketua

KATA PENGANTAR

Dari rangkaian pemilihan kepala daerah yang pernah digelar selama ini, belum seluruh problematika pemilu dapat dipecahkan secara memuaskan. Masih terdapat beragam persoalan, misalnya pemutakhiran daftar pemilih, sistem keadilan pemilu, akuntabilitas penyelenggaraan, serta integritas proses dan hasil pilkada.

Keberhasilan atau kegagalan pilkada, ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Proses penyelenggaraan pilkada, khususnya pengawasan, melibatkan seluruh elemen, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan, yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan di semua tahapan pilkada.

Dari pelaksanaan pilkada yang telah berjalan selama ini, faktor-faktor subyektif memiliki peran signifikan dalam dinamika demokrasi elektoral. Faktor subyektif ini adalah menyangkut aspek keaktoran politik, dengan latar keadaan masing-masing daerah, agama, kepentingan ras dan suku bangsa, keragaman budaya, serta corak multikulturalisme.

Faktor obyektif juga memiliki sumbangan besar dalam pembentukan demokrasi elektoral selama ini, yakni keadaan iklim yang sewaktu-waktu berubah; keadaan geografis dari wilayah yang terpisahkan di antara pulau besar, sedang, dan kecil serta posisi terpencil atau terluarnya letak wilayah dari pusat-pusat pertumbuhan; ataupun faktor demografis dengan keadaan yang tidak mudah untuk disatukan dalam satu komitmen untuk membangun dan membentuk demokrasi elektoral.

Salah satu evaluasi penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun 2017 adalah adanya peningkatan wacana politisasi isu

suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam kampanye untuk memengaruhi pilihan politik. Penggunaan isu SARA tersebut kemudian berpotensi berulang kembali dalam pelaksanaan pilkada serentak gelombang ketiga pada tahun 2018.

Dengan mengambil sejumlah daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2018, Bawaslu melakukan penelitian dengan mengacu kepada pertanyaan dasar, yaitu bagaimana potensi penggunaan isu SARA dalam Pilkada 2018 dan bagaimana keberpihakan (pemahaman, persepsi) dari aktor-aktor strategis di tingkat lokal terhadap isu SARA tersebut. Terdapat empat fokus utama dalam penelitian ini, yaitu tingkat pemahaman terhadap SARA, keberpihakan terhadap penggunaan SARA dalam politik, pemetaan pengalaman penggunaan SARA, dan potensi penggunaan SARA dalam politik Pilkada.

Pengumpulan data dilakukan dengan menerjukan tim peneliti ke enam daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2018. Tim peneliti menggali informasi melalui diskusi mendalam dan terfokus (FGD) dan juga wawancara mendalam; di mana kemudian data terdokumentasi tersebut diolah dengan mengelompokkannya ke dalam instrumen matriks potensi penggunaan SARA dalam Pilkada.

Hasil penelitian yang tertuang dalam laporan ini menjadi acuan dan rekomendasi terhadap penyusunan alat kerja pengawasan dan metode pencegahan yang akan dilakukan oleh Bawaslu terhadap Pilkada 2018. Strategi pengawasan dan metode pencegahan yang didahului dengan penelitian semoga semakin mengurangi potensi pelanggaran Pilkada yang terjadi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan kualitas Pilkada.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I

PENDAHULUAN	1
0.1 Latar Belakang.....	1
0.2 Pertanyaan dan Tujuan Penelitian	3
0.3 Metode Penelitian.....	3
0.4 Lokasi Penelitian	5

BAB II

IDENTIFIKASI AKTOR POLITIK SARA	7
1.1 Identifikasi Aktor Politik SARA di Sumatera Utara ..	9
1.2 Identifikasi Aktor Politik SARA di Jawa Barat	13
1.3 Identifikasi Aktor Politik SARA di Jawa Tengah	19
1.4 Identifikasi Aktor Politik SARA di Jawa Timur	27
1.5 Identifikasi Aktor Politik SARA di Kalimantan Barat.....	37
1.6 Identifikasi Aktor Politik SARA di Sulawesi Utara ...	40

BAB III

KEBERPIHAKAN, POTENSI, DAN

ANTISIPASI POLITIK SARA	45
2.1 Sumatera Utara.....	45
2.2 Jawa Barat.....	48

2.3 Jawa Tengah	51
2.4 Jawa Timur	53
2.5 Kalimantan Barat	57
2.6 Sulawesi Utara	26
BAB IV	
SIMPULAN DAN REKOMENDASI	63
LAMPIRAN	68
LAMPIRAN 1 : Panduan Wawancara.....	68
LAMPIRAN 2 : Narasumber dan/atau Responden	70

0.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2017 ini menghasilkan peningkatan wacana politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan dalam kampanye memengaruhi pilihan politik. Salah satu pilkada yang ditengarai dengan politisasi isu SARA secara masif dan intens adalah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

Beberapa bukti menunjukkan isu SARA digunakan oleh kelompok-kelompok dan pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan kemenangan pasangan calon tertentu saat Pilkada DKI Jakarta 2017 tersebut. Contohnya adalah kemunculan komentar, foto-foto, dan video di media sosial yang bernada rasis dan menghina kelompok suku/agama lain; atau beredarnya spanduk-spanduk provokatif yang berupaya memengaruhi keyakinan warga dan bisa berdampak pada pilihan politik. Contoh lain adalah keberadaan spanduk provokatif seperti larangan memilih pemimpin yang berbeda agama atau larangan mensalatkan jenazah warga yang mendukung pemimpin yang berbeda agama sehingga memengaruhi situasi kondusif di tengah-tengah masyarakat.



Isu SARA dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta yang lalu mendapat perhatian luas bukan hanya masyarakat DKI Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Media massa nasional meliput dan memberitakan seluk-beluk tentang Pilkada DKI, bahkan kemudian terkesan mengesampingkan penyelenggaraan pilkada di daerah-daerah lainnya pada tahun 2017.

Penyelenggara pemilu, terutama Badan Pengawas Pemilu, dituntut untuk peka dan responsif terhadap berkembangnya isu SARA dalam pilkada. Intimidasi dan ancaman kekerasan yang bersifat SARA acap kali terjadi, namun sulit untuk diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang ada. Kampanye berbau SARA yang marak sangat cepat menyebar. Akan tetapi respons Bawaslu dan jajarannya hingga tingkat lokal dinilai masih lambat dan normatif sehingga tidak mampu mengelola peristiwa-peristiwa yang tendensinya dapat bertentangan dengan prinsip pemilu yang demokratis.

Suatu realitas: Bawaslu belum memiliki instrumen pengawasan yang terstandarisasi dan terukur untuk mendeteksi dini politisasi isu SARA dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Selain itu, untuk kepentingan evaluasi Pilkada 2017 dan dalam rangka menghadapi Pilkada 2018, Bawaslu perlu memetakan potensi konflik SARA dan penggunaan isu SARA dalam kampanye pilkada yang dapat mengancam prinsip pemilu yang luber dan jurdil.



0.2 Pertanyaan dan Tujuan Penelitian

Pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi penggunaan isu SARA dalam Pilkada 2018, dengan mengambil sejumlah contoh kasus daerah yang melaksanakan pilkada pada tahun 2018?
2. Bagaimana keberpihakan (pemahaman, persepsi) dari aktor-aktor strategis di tingkat lokal terhadap isu SARA dan penggunaannya dalam pilkada?

Penelitian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan kepada Bawaslu tentang potensi penggunaan isu SARA dalam Pilkada 2018 berikut penyusunan instrumen pengawasannya.

0.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pengalaman dan pendapat para informan kunci tentang penggunaan isu SARA dalam pilkada, serta mengetahui perkiraan langkah-langkah yang akan dilakukan para aktor kunci untuk mengatasi politisasi isu SARA di daerahnya. Tim peneliti melakukan kelompok diskusi mendalam dan terfokus (*focus group discussion*) dengan mengundang beberapa narasumber. Informasi yang telah diperoleh dari diskusi tersebut kemudian diperdalam lagi melalui wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi yang komprehensif.

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder, dengan rincian sebagai berikut:



Jenis Data	Teknik Pengumpulan Data	Keterangan
Primer	<ol style="list-style-type: none">1. Focus Group Discussion (FGD)<ul style="list-style-type: none">- Diadakan satu kali di ibukota provinsi- Peserta berkisar 11-20 orang- Kategori peserta adalah:<ol style="list-style-type: none">1. Akademisi (2-3 orang)2. LSM (2-3 orang)3. Lembaga pemantau (2-3 orang)4. Wartawan (1 orang)5. KPU Provinsi (1 orang)6. KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pilkada di provinsi bersangkutan (2 orang/daerah)7. Perwakilan ormas (2 orang)8. Bawaslu Provinsi (1-2 orang)9. Kesbangpol Provinsi (1 orang)10. Humas Kepolisian Daerah (1 orang)11. Komisi Penyiaran Indonesia-Daerah (1 orang)	<ul style="list-style-type: none">▪ FGD diadakan pada 8 atau 9 Juni 2017▪ Bertempat di kantor Bawaslu Provinsi atau jika tidak memungkinkan, dilaksanakan di tempat lain▪ FGD dipimpin oleh seorang fasilitator dan dibantu <i>note taker</i> (pencatat).▪ Peserta FGD memperhatikan komposisi jenis kelamin, minimal 30% peserta FGD adalah perempuan
	<ol style="list-style-type: none">2. Wawancara Mendalam<ul style="list-style-type: none">- Wawancara mendalam bertujuan menindaklanjuti atau memperdalam informasi yang perlu dikonfirmasi dari hasil FGD.- Bisa dilakukan terhadap peserta FGD tertentu yang dianggap perlu diperdalam ataupun informan lain yang tidak diundang dalam FGD.- Informan target wawancara mendalam adalah:<ol style="list-style-type: none">1. Ketua DPD partai politik. Pemilihan partainya adalah: (1) potensial mencalonkan bakal pasangan calon, (2) perwakilan partai oposisi pemerintah (Gerindra/PKS).2. Tokoh ormas berpengaruh di daerah dan memiliki relevansi dengan penggunaan isu SARA. Misalnya ketua ormas pemuda, ormas agama, ormas kesukuan.	<p>Lokasi wawancara mendalam diutamakan di ibukota provinsi dan sekitarnya.</p> <p>Wawancara mendalam diadakan setelah pelaksanaan FGD.</p> <p>Peneliti mengembangkan hasil FGD dalam wawancara mendalam agar memperoleh kedalaman informasi.</p>



Jenis Data	Teknik Pengumpulan Data	Keterangan
Sekunder	<p>Penelusuran data pustaka melalui: hasil penelitian yang telah ada, dokumentasi laporan Bawaslu Provinsi, kliping berita media cetak, buku/terbitan yang relevan.</p> <p>Jenis data sekunder yang dikumpulkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi kursi DPRD Provinsi untuk pemetaan pencalonan dan jumlah perolehan suara. 2. Data kekerasan sampai dengan 2015. 3. Data Pilkada provinsi terakhir (tahun 2013) mencakup: kasus-kasus kekerasan, intimidasi, penggunaan isu SARA, diskriminasi. 4. Pemetaan kekuatan politik dan sejarah konflik berbasis isu SARA. 5. Penelusuran bakal calon potensial (latar belakang, potensi menjadi korban atau pelaku). 	<p>Pengumpulan data sekunder dimulai sebelum peneliti turun lapangan untuk menentukan informan dari partai politik.</p>

0.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan kriteria utama adalah daerah yang mengadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilkada provinsi). Lokasi penelitian ditentukan enam daerah, dengan secara sengaja memprioritaskan wilayah yang jumlah pemilihnya relatif banyak. Enam daerah lokasi penelitian adalah:

1. Sumatera Utara
2. Jawa Barat
3. Jawa Timur
4. Jawa Tengah
5. Kalimantan Barat
6. Sulawesi Utara



**BAB
2****IDENTIFIKASI
AKTOR
POLITIK SARA**

Identifikasi aktor politik SARA dilakukan untuk menjawab siapa aktor yang relevan dalam memproduksi dan mendistribusi isu SARA dalam politik, termasuk juga menjawab bagaimana pendapat dan posisi aktor politik di beberapa daerah yang dijadikan area riset terkait dengan isu SARA dalam politik.

Untuk memperoleh gambaran tentang identifikasi aktor politik SARA di enam daerah terpilih, dikemukakan pertanyaan mendasar tentang SARA dan politik SARA itu sendiri. Apakah publik, khususnya responden terpilih, memahami tentang SARA dan politik SARA? Jawaban atau uraian informan dalam forum diskusi kelompok secara mendalam dan terfokus serta wawancara mendalam memberikan gambaran tentang SARA dan bagaimana SARA dibawa ke dalam ranah politik.

Dari penjelasan para responden, umumnya mereka bersepakat bahwa SARA berhubungan dengan identitas agama dan suku/etnis yang melekat pada individu tertentu. Kondisi Indonesia yang sangat heterogen dari sisi identitas tidak menyulitkan bagi responden untuk mengenali soal SARA tersebut. Merespons pertanyaan perihal bagaimana SARA bisa masuk ke ranah politik, narasumber dalam riset ini setidaknya



menyebutkan dua kondisi, yaitu karena alamiah/natural (*given*) dan karena sesuatu yang bersifat direkayasa (*by design*).

Kondisi pertama masuknya isu SARA ke ranah politik disebabkan karena alamiah/natural (*given*). Sebagai sesuatu yang bersifat fitrah/*given*/alamiah, SARA adalah sesuatu yang tak dapat dielakkan dari panggung politik serta merupakan kehendak alamiah dari subyek yang memiliki identitas untuk membawa dan mempertaruhkan identitas yang melekat pada dirinya dalam ruang politik. Bagaimanapun politik dianggap juga merefleksikan pertarungan identitas. Dari sisi ini, konflik identitas menjadi sesuatu yang alamiah atau kondisi yang memang harus terjadi. Dengan demikian, politik SARA tidak mungkin bisa dihindari. Akan tetapi, amat sedikit responden yang menyatakan bahwa maraknya politik SARA di Indonesia adalah bagian dari pandangan kelompok pertama ini.

Pendapat kedua menyatakan bahwa politik SARA adalah sesuatu yang bersifat direkayasa (*by design*). Politik SARA merupakan sesuatu yang dirancang dalam rumah politik sehingga SARA menjadi komoditas politik yang digunakan pada saat tertentu untuk memperoleh keuntungan-keuntungan politik. Di sini SARA dilihat hanya dijadikan sebagai komoditas atau barang dagangan untuk bisa memperoleh dukungan publik yang memiliki kesamaan identitas untuk bisa ambil bagian dari suatu pertarungan politik. Dari cara pandang ini, ada kalanya SARA dipakai sebagai senjata politik, namun ada saatnya SARA tidak dipakai dalam pertarungan politik. Umumnya dari penjelasan informan riset ini, yang terjadi di masyarakat adalah potret bagaimana SARA direkayasa sedemikian rupa sebagai alat komoditas politik.



1.1 Identifikasi Aktor Politik SARA di Sumatera Utara

Dengan jumlah penduduk dan wilayah terbesar di Pulau Sumatera, Sumatera Utara memiliki posisi strategis dalam konteks politik. Sumatera Utara memiliki keragaman agama, suku, agama, dan antargolongan. Suku yang dominan di Sumatera Utara adalah Batak, Melayu, Karo, Nias, dan Jawa. Agama yang ada di Indonesia, semua terdapat di Sumatera Utara. Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Sumatera Utara, namun penganut agama Kristen Protestan juga sangat besar di Sumatera Utara. Sedangkan keberagaman golongan tercermin dari maraknya organisasi massa, partai politik, dan kelompok-kelompok organisasi sipil lainnya. Berdasarkan zona wilayah, Sumatera Utara dapat dikelompokkan setidaknya menjadi tiga bagian, yakni bagian utara dengan penduduk mayoritas beragama Kristen, penduduk di bagian selatan yang mayoritas beragama Islam, dan di bagian tengah Sumatera Utara yang sangat heterogen namun Islam masih menempati posisi tertinggi.

Pada tataran praktik, politik SARA di Sumatera Utara telah nampak dari beberapa peristiwa politik yang pernah terjadi. Uraian akademisi FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) Iqbal Fauzan, sejak otonomi daerah digulirkan di Indonesia pada awal Orde Reformasi, aroma politik SARA telah mengemuka di Sumatera Utara. Hal ini terlihat, misalnya, dari adanya pembelahan politik antara aktor politik dengan membagi masyarakat ke dalam kelompok “putra daerah” dan “non-putra daerah”. Dalam hal ini, menurut Iqbal Fauzan, subyek politik yang paling utama boleh tampil dalam panggung politik lokal Sumatera Utara adalah kelompok “putra daerah”. Identitas suku sangat melekat di situ. Mereka yang bukan berasal dari suku lokal dianggap tidak memiliki tiket sebagai pemain politik utama.



Politik SARA dapat terjadi di lapangan politik Sumatera Utara disebabkan oleh adanya rekayasa dari elite politik. Identitas sosial selalu saja –memakai bahasa Iqbal Fauzan– “digoreng” terus-menerus oleh elite dan aktor politiknya. Rakyat hanyalah obyek, sedangkan subyeknya adalah partai politik. Kelompok kepentingan bertindak selaku aktor intelektual. Kondisi ini akan memunculkan ketidakadilan sosial dan politik sehingga melahirkan sikap intoleran di masyarakat. Repotnya, dari sikap intoleran akan berpotensi pada munculnya sikap radikalisme yang bisa saja berujung pada praktik anarkisme.

Selain Iqbal Fauzan, aktivis Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara, Rurita Ningrum, menyatakan bahwa pada tahun 2016 nyata sekali bagaimana kandidat memasang baliho dan spanduk dengan menegaskan identitas SARA-nya. Hal itu terjadi dengan ekspektasi akan memperoleh dukungan dari pemilih yang memiliki kesamaan identitas dengan calon tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bagaimana program, visi dan misi bukan merupakan parameter utama, melainkan justru identitas.

Peristiwa politik SARA yang menimbulkan gesekan paling nyata tergambar pada Kasus Protap 2009 ketika anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Aziz Angkat meninggal dunia. Kenyataan pahit itu adalah cermin adanya politik SARA yang dimainkan oleh kelompok tertentu untuk memperoleh keuntungan politik. Dinamika yang terjadi saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2010 antara pasangan Sofyan Tan-Nelly Armayanti yang bersaing dengan pasangan Rahudman Harahap-Dzulmi Eldin juga menggambarkan bagaimana politik SARA lebih dominan dari pada politik substantif dan politik cerdas.

Maraknya politik SARA pada Pilkada DKI Jakarta 2017 turut berpengaruh ke daerah-daerah, khususnya di Sumatera



Utara. Adrian Harahap dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara menegaskan bahwa politik SARA di DKI Jakarta dapat tersebar luas dengan mudah karena adanya media sosial. Ia mencontohkan betapa mudahnya isi iklan video Ahok-Djarot yang bermuatan SARA tersebar ke seantero Indonesia, tanpa terkecuali Sumatera Utara.

Dari sisi konten kampanye, menurut Adrian Harahap, perlu diperjelas status peraturan perundang-undangan manakala ada pengkhotbah bicara sesuatu hal yang berhubungan dengan keyakinannya. Misalnya kewajiban memilih pemimpin yang harus sesuai dengan agamanya. Menurut Adrian Harahap, jika tokoh agama mengumpulkan orang di tempat umum dan menyampaikan ceramah yang menyerempet ke persoalan politik atau pemilu, perlu ada ketegasan dari pihak terkait jika terdapat hal-hal yang melanggar aturan kepemiluan. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan di tempat ibadahnya, hal tersebut tidak perlu dipersoalkan karena merupakan bagian dari tugasnya sebagai seorang pendakwah.

Terlepas dari pro-kontra sebagaimana disampaikan Adrian, semua responden sepakat bahwa politik SARA pada Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah contoh politik yang tidak baik. Syafrida Rasahan, anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menegaskan Pilkada DKI Jakarta menciptakan pengkotak-kotakan masyarakat berbasis SARA. Hal ini, menurut Syafrida, jika tidak dikelola dengan baik bisa berimplikasi pada kondisi disintegrasi bangsa. Keresahan juga dirasakan hampir semua responden. Bahkan menurut Rurita Ningrum, kalangan terdidik dari organisasi masyarakat sipil di Sumatera Utara sekalipun terbawa arus Pilkada DKI Jakarta. Para aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki basis kelompok di daerah sudah mulai menjadi komentator kasus SARA di DKI Jakarta



dan dibawa ke basis masing-masing.

Semua responden menyatakan tidak setuju jika politik SARA dijadikan sebagai basis material dalam ruang politik. Bahwa ada identitas yang melekat pada suatu individu politikus merupakan suatu takdir atau warisan yang tak dapat dielakkan. Namun bahasa dan substansi politik dalam ruang publik mestinya tidak berbasis pada isu SARA. Jefrizal dari organisasi pemantau pemilu JPPR, misalnya, menekankan ketidaksetujuannya ketika SARA digunakan sebagai parameter politik. Dalam konteks politik SARA, yang dijadikan indikator oleh seseorang untuk memilih seorang kandidat adalah latar belakang emosionalnya, semisal faktor agama seseorang, suku, kelompok, dan golongan. Biasanya cara pandang seperti ini akan mengaburkan aspek substansi atau kualitas kandidat. Akan sangat mungkin orang yang berkualitas dan berintegritas tidak akan terpilih dalam kompetisi politik karena faktor perbedaan latar belakang identitas.

Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara, Yulhasni menyampaikan pentingnya pemimpin kelompok masyarakat, LSM, dan partai politik menyampaikan kepada massanya untuk tidak menggunakan SARA dalam Pilkada. Penting juga manakala pemimpin berbagai kelompok tadi untuk tidak menggunakan orientasi SARA sebagai basis dan tujuan politik. Kekhawatiran responden lain, bahkan tak terkecuali dari aparat kepolisian, manakala politik SARA mengemuka dan tidak dapat dikelola dengan baik. Menurut Masana, Kasubbag Analisis Ditintelkam Polda Sumatera Utara, politik SARA yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan banyak kerugian, baik harta benda, bahkan sampai korban jiwa. Akan lebih banyak yang harus dibayar ketika kondisi konflik politik identitas atau SARA tersebut tidak bisa diredam dan diantisipasi potensi kerawanannya. Firdaus Hutasuhut dari Kesbangpol Provinsi



Sumatera Utara juga menyatakan kerisauannya jika politik SARA lebih dominan. Menurutnya, politik SARA sangat merugikan karena yang terpilih nanti pemimpin yang tidak mempunyai kemampuan di daerah tersebut karena hanya berdasarkan golongan atau kelompok saja.

1.2 Identifikasi Aktor Politik SARA di Jawa Barat

Jawa Barat menempati peringkat pertama provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Merujuk data “Jawa Barat dalam Angka Tahun 2016”, penduduk Jawa Barat mencapai 43 juta jiwa. Dari total penduduk Jawa Barat tersebut, sekitar 40 juta orang memeluk agama Islam, sedangkan tiga juta lainnya terbagi ke dalam pemeluk agama Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan lainnya. Kategori lainnya tersebut termasuk penganut kepercayaan seperti kelompok Sunda Wiwitan serta keyakinan leluhur yang diyakini kaum Baduy yang masih sangat kental memegang adat/tradisi di tengah era modernisme dan globalisasi.

Wilayah Jawa Barat berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta sehingga konstelasi pada Pilkada DKI Jakarta bisa langsung terasa di Jawa Barat. Dari informasi media massa, peserta aksi bela Islam di Jakarta pada beberapa gelombang pada akhir tahun 2016 juga diikuti oleh penduduk Muslim dari beberapa wilayah di Jawa Barat.

Tidak jauh berbeda dengan Sumatera Utara, semua responden di Jawa Barat telah memahami tentang SARA yang merupakan bagian inti dari adanya eksistensi identitas. Dengan demikian, ketika disodorkan pertanyaan apakah responden memahami tentang SARA, tidak terlalu sulit bagi responden memberikan jawabannya. Sedangkan perihal bagaimana



eksistensi politik SARA dalam ranah politik lokal Jawa Barat, jawabannya sangat dinamis.

Para narasumber rata-rata menyadari bahwa SARA merupakan bahan komoditas yang bisa dibawa ke ranah politik. Kecenderungan menguatnya potensi SARA yang dibawa ke daerah Jawa Barat juga tidak lepas dari konteks kepentingan politik. Dengan keragaman yang dimiliki Jawa Barat, meskipun pemeluk Islam merupakan mayoritas, politik SARA bukan sesuatu yang mustahil untuk dimainkan pada kontestasi demokrasi seperti pilkada dan juga pemilu presiden.

Menurut Alan Barok, aktivis dari JPPR, politik SARA bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Semenjak keran demokrasi dibuka pada awal Reformasi, aroma politik SARA telah muncul. Pembicaraan SARA/identitas dalam ruang politik adalah sebuah keniscayaan dan wajar-wajar saja. Pasca-digulirkannya Undang-undang tentang Pilkada muncullah ide-ide SARA. Dari semua responden di Jawa Barat, hanya aktivis JPPR yang secara terbuka menyatakan posisi sependapat dengan politik SARA. “Saya setuju dengan penggunaan politik identitas,” ujar aktivis JPPR tersebut.

Namun, nada khawatir terhadap penggunaan isu SARA dalam politik lebih besar lagi. Kekhawatiran atas munculnya isu SARA dalam politik di Jawa Barat disampaikan sejumlah narasumber. Representasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat misalnya, menyatakan bahwa “Isu terkait dengan politik SARA saat ini kita akui memang sudah mulai muncul.” Bahkan menurut analisisnya, meski berbeda gelombangnya dengan peristiwa politik SARA di DKI Jakarta, politisasi SARA di Jawa Barat terutama terkait dengan kesukuan atau antargolongan akan semakin berkembang. Perwakilan lembaga pemantau pemilu KIPP mengingatkan agar jangan sampai ada ruang penggunaan



isu SARA dalam politik karena hal itu berdampak panjang dan sangat berbahaya bagi perjalanan demokrasi di Indonesia serta akan memunculkan masalah sosial dan kriminal nantinya.

Sementara itu, anggota KPU Provinsi Jawa Barat, juga menyatakan bahwa politisasi SARA itu manifest dalam kehidupan politik di Jawa Barat. Hanya saja isu SARA yang muncul bukan tendensi agama. Bisa diprediksi mayoritas atau bahkan semua bakal calon kepala daerah di Jawa Barat adalah Muslim sehingga hal tersebut tidak menimbulkan kontroversi di tengah pemilih yang mayoritas Muslim. Perdebatan SARA di Jawa Barat justru terjadi pada aras antargolongan dan suku. Berkaca dari pengalaman Pemilihan Gubernur 2013, yang muncul saat itu adalah isu komunisme. Yang juga mungkin muncul adalah perdebatan soal antargolongan di dalam agama, seperti pertikaian antara kelompok Sunni dan Syiah. Namun menurut komisioner KPUD tersebut, khusus mayoritas warga kota Bandung tidak terlalu terpengaruh oleh isu agama atau isu antargolongan.

Meskipun demikian, sikap waspada dan nada peringatan disampaikan oleh Alan akademisi Universitas Ahmad Yani (Unjani) Jawa Barat. Ia memberikan penilaian bahwa politik SARA jika tidak dikelola dan dikendalikan dengan baik akan memiliki implikasi buruk bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik SARA akan memiliki akibat yang panjang, bahkan bisa mencapai disintegrasi bangsa. Untuk itu, ia mengingatkan kepada aktor politik elektoral untuk tidak memainkan isu SARA terus-menerus. Hal senada juga disampaikan oleh representasi Kepolisian dan Kesbangpol Jawa Barat.

Sementara itu, kalangan masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat menilai bahwa isu SARA sebagai bahan



atau alat dalam rumah politik telah hadir di Jawa Barat. Menurut pengakuan Kustini dari Himpunan Wanita Difabel Indonesia (HWDI), berdasarkan pengalaman pribadi, isu SARA sudah mulai terasa di Jawa Barat. Di majelis taklim sudah muncul suara-suara yang menyerukan untuk tidak memilih si A dan mendorong warga untuk memilih si B. Seruan tersebut misalnya, “Jangan pilih Pak Dedi Mulyadi karena dia menganut aliran kepercayaan ‘Sunda Wiwitan’ yang bisa berdampak berkembangnya Animisme di Jawa Barat”. Ada pula himbauan seperti, “Jangan pilih Dedy Mizwar karena beliau bukan berasal dari Jawa Barat.” Argumentasi yang digunakan dari himbauan politik tersebut sama sekali tidak berlandaskan rasionalitas dan jauh dari prinsip hidup berbangsa dan bernegara yang berdasar Pancasila. Aspek primordial dan identitas lebih ditonjolkan ketimbang substansi kebangsaan dalam membangun demokrasi politik yang beradab.

Meskipun nada peringatan telah disampaikan oleh akademisi Unjani, Kepolisian, Kesbangpol, aktivis HWDI, dan mayoritas responden; beberapa responden menyatakan bahwa psikososial masyarakat Jawa Barat itu tidak mudah diadu domba atau dipengaruhi oleh isu-isu bernada negatif. Kondisi tersebut tentu menggembirakan kita. Hal itu misalnya disampaikan oleh aktivis BKOW Jawa Barat, dan Kesbangpol Jawa Barat untuk menyebut beberapa dari keseluruhan responden. Menurut Euis Siti Julaeha, aktifis BKOW Jawa Barat, dalam momentum kontestasi politik di Jawa Barat, sepanas apapun suhu politiknya tidak akan mengendap dalam akar sosial masyarakat. Suhu panas politik itu akan segera menurut dan kembali dalam keadaan normal. Yang penting, aparat dan pengawas pemilu harus bertugas dengan benar sesuai kewenangannya. Dalam bahasa Euis Siti Julaeha, iya menyampaikan, “Di Jabar apapun yang terjadi tidak masalah, ramainya pada saat itu saja, kalau



sudah selesai ya selesai dan tidak ada masalah. Yang terpenting adalah kejujuran dari aparat itu sendiri dan pengawasan yang betul-betul melekat”.

Senada dengan Euis, Achmad Antony dari Kesbangpol Jawa Barat menyatakan juga bahwa masyarakat Jawa Barat itu tidak mudah dipecah hanya karena faktor isu SARA yang dihembuskan oleh sekelompok orang. Menurut Achmad faktor kemajemukan masyarakat Jawa Barat turut menyumbang kohesifitas politik di Jawa Barat. Dalam masyarakat majemuk yang diinginkan warga adalah ketentraman, dan saling menghormati sehingga apapun latar belakang identitasnya masyarakat dapat hidup berdampingan dengan kohesif. Sebagaimana dituturkan oleh Achmad Antony, “Masyarakat Jabar itu masyarakat majemuk, anggota legislatif 70 persen masyarakat Jabar. Masyarakat Jabar itu masyarakat yang unik, ramai pada saat Pilkada, setelah selesai Pilkada ya sepi.”

Dengan demikian, ada suatu hawa positif dari penjabaran responden di Jawa Barat bahwa jika terjadi sesuatu yang kontroversial terkait momen politik, hal tersebut terjadi hanya pada saat itu saja, tidak berkepanjangan, cepat tiba cepat pula hilangnya. Hanya saja perlu digaris bawahi di sini, energi positif dari masyarakat tidak serta merta mencegah terjadinya politik SARA di Jawa Barat. Di situlah diperlukan langkah-langkah antisipatif agar aura negatif dari politik SARA tidak berhembus di Jawa Barat. Pada bagian berikutnya, kita akan memaparkan langkah-langkah antisipatif yang dibutuhkan untuk mencegah tidak terjadinya politik SARA. Sebelum ke sana, kita harus tahu apa saja faktor yang mengkondisikan politik SARA dapat terjadi.

Dari uraian para narasumber yang menjadi responden penelitian ini, penyebab terjadinya politik SARA itu setidaknya ada empat hal. Pertama, faktor pendidikan politik di masyarakat



yang rendah. Kedua, *framing* media massa yang gencar menyuarakan politik SARA. Ketiga, faktor aktor politik yang sengaja menggunakan isu SARA sebagai komoditas politik. Keempat, hal itu didukung oleh realitas kesenjangan mayoritas dan minoritas yang tinggi.

Faktor pendidikan politik dapat dimaknai sebagai upaya memberikan informasi politik yang berkualitas dan cerdas kepada masyarakat. Idealnya masyarakat dikenalkan dengan debat visi, misi, dan program serta riwayat rekam jejak aktor politik. Dengan demikian masyarakat akan memiliki preferensi tentang calon-calon yang benar-benar dapat memberikan solusi transformatif atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Realitasnya pendidikan politik tidak diberikan dengan baik, tidak terkecuali di Jawa Barat. Ironinya, Partai politik dan politisi yang mestinya memiliki tugas untuk memberikan pendidikan politik, tetapi pada kenyataannya mereka tidak benar-benar memberikan pendidikan politik.

Deden Fardah dari KPID Jawa Barat menyatakan, “Masyarakat itu tidak diberikan pendidikan politik, dimana seharusnya mereka tahu isi, visi, misi dan lain sebagainya tetapi kemudian masyarakat malah tergiring isu SARA yang memang dikonstruksi oleh media”. Senada dengan Deden Fardah, aktifis Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Jawa Barat Ijang Faisal berpendapat penyebab meluasnya politik SARA adalah karena kurangnya pendidikan politik di tengah masyarakat. Ijang menuturkan secara utuh, “Kami di KNPI orangnyakan macam-macam, ada Batak, Sunda, Jawa dan lain-lain. Kita biasa saja tidak ada masalah. Kenapa politik SARA terjadi karena pendidikan politik untuk kita itu masih kurang”.

Selain pendidikan politik yang minim, politik SARA menjadi lebih meluas dengan pengaruh media massa. Media massa di sini



dapat berupa media *mainstream* seperti televisi, koran, dan radio, ataupun media sosial yang berkembang selama satu dasawarsa belakangan seperti *facebook, instagram, twitter, whatsapp, line,* dan *telegram*. Realitasnya justru media menjadi bagian vital dari kampanye politik yang tidak sehat. Upaya menjatuhkan lawan dilakukan dengan perangkat media. Perwakilan KPID Jawa Barat deden Fardah menegaskan hal itu, “Media malah memperkeruh bahkan meghebohkan isu SARA”. Padahal menurutnya, kode etik media sudah jelas, di dalam mediapun tidak boleh ada pemberitaan negatif tentang SARA.

Faktor ketiga yang mendorong munculnya politik SARA adalah aktor politik, bisa politikus partai politik, tim sukses kandidat calon kepala daerah, dan bahkan konsultan ahli politik yang merancang strategi kampanye calon. Mereka inilah yang memproduksi isu SARA ke dalam ranah politik. Berikutnya adalah faktor adanya kesenjangan antara mayoritas dan minoritas. Menurut Alan Barok aktivis JPPR Jawa Barat, kesenjangan ini dapat dimanfaatkan oleh aktor politik untuk mewujudkan kepentingan politiknya.

1.3 Identifikasi Aktor Politik SARA di Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk dan jumlah kabupaten/kota yang besar di Indonesia. Jawa Tengah juga memiliki keunikan dari sisi sosiologis masyarakatnya. Kultur masyarakat Semarang, terdapat perbedaan dengan kultur Solo, begitupun dengan Blora, Cilacap, dan Tegal.

Basis sosial keagamaan masyarakat Jawa Tengah juga berbeda. Namun secara umum penduduk Jawa Tengah adalah Muslim. Jika dilihat dari sisi historis, penggolongan masyarakat



yang dilakukan oleh Clifford Geertz tentang masyarakat abangan, santri, dan priyayi; menemukan ruang nyata di Jawa Tengah – walaupun tentu ada pula priyayi yang santri atau priyayi yang abangan. Peninggalan kerajaan berbasis Islam, Hindu, dan Budha masih sangat kental terasa di Jawa Tengah. Pengaruh tiga agama tersebut dapat terlihat dari kehidupan sosial masyarakat Jawa Tengah. Basis sosial tersebut juga terhubung dengan partai politik yang memiliki corak abangan dan nasionalis serta bercorak santri atau keagamaan.

Semua responden secara meyakinkan menyatakan bahwa SARA berhubungan dengan identitas yang melekat pada diri seseorang. Identitas itu berupa jenis kelamin, agama, suku, etnis, ras, dan antargolongan atau ideologi. Semua responden juga sepakat menjawab tidak setuju penggunaan isu SARA dalam pilkada. Dari penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, KPUD, kemudian masyarakat sipil hingga aparat seperti kepolisian dan wakil pemerintah menyatakan tidak kesetujuannya pada politik SARA. Sebagai misal, Sri Handoko dari KPU Karanganyar menyatakan, “Tentu saja penggunaan isu SARA dalam Pilkada itu merupakan hal yang tidak bisa kita toleransi. Peraturan perundang-undangan juga jelas melarang kampanye menggunakan isu SARA.” Begitupun perwakilan dari masyarakat sipil seperti terangkum dari pendapat Ibu Hanum dari LBH APIK. Baginya, politik SARA merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Secara utuh ia mengatakan, “Kami tidak setuju karena politik SARA dijadikan alat praktis untuk mendapatkan massa yang banyak merupakan kemunduran demokrasi.”

Perwakilan dari partai politik yang diwawancarai juga menyatakan ketidaksetujuannya dengan politik SARA. Sriyuningsih dari PDIP misalnya, menyatakan, “Kita negara yang mengakui keberagaman, keberagaan budaya, agama,



suku bangsa. Jadi kalau kita mengaku sebagai negara yang menjunjung keberagaman harusnya tidak memakai isu SARA dalam kampanye atau dalam pencalonan. Bagi PDI Perjuangan sudah *finish*, dalam artian kita tidak ada lagi, oh di PDIP tidak boleh ada Nasrani, China, Batak. Gak boleh begitu. Di PDIP itu sudah *finish* soal ideologi dan keberagaman. *Gak* laku di PDIP isu SARA.”

PDIP yang notabeneanya adalah partai politik yang berbasis pluralisme tentu wajar berpandangan seperti itu. Partai politik yang memang berbasis agama, seperti PKB secara tegas menyatakan ketidaksetujuan mereka pada politik SARA. Sementara perwakilan PKS juga prihatin atas dampak prikososial yang ditimbulkan, namun PKS masih menganggap wajar adanya politik SARA di era kompetisi politik sekarang.

Wakil dari PKB Jawa Tengah, yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman menyatakan, “Politik SARA justru mencabik sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan Pancasila dan kebhinekaan NKRI. Kita memahami ada pola pendekatan yang salah dari pemerintah. Karena nuansa politiknya sangat kental sekali sehingga sampai menimbulkan persoalan-persoalan seperti itu. Ini tidak boleh dibiarkan, dan juga tidak boleh bergeser kepada provinsi lain yang mau melakukan Pilkada.” Sukirman jelas sekali menyayangkan adanya politik SARA yang memiliki implikasi negatif terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Namun ia juga mengkritik pemerintah yang menurutnya juga melakukan komunikasi politik atau tindakan politik yang tidak elegan sehingga menimbulkan persoalan SARA.

Sementara itu, Ketua Bidang Humas DPW PKS Jawa Tengah yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso, menyatakan, “Kami secara institusi



melihat tajamnya aspek kompetisi di Jakarta yang membawa isu politik identitas sangat prihatin karena ini mengoyak sendi kehidupan bernegara kita. Meskipun sebenarnya kejadian ini sebuah hal yang wajar. Kenapa, karena dalam konteks kompetisi apalagi kompetisi *man to man marking*, *head to head*, rekam jejak, *background*, kelebihan dan kekurangan akan menjadi komoditas politik dan tidak bisa dihindari.”

Hadi Santoso prihatin atas dampak dari adanya politik SARA di saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Baginya dampak politik SARA mampu merusak tatanan sosial masyarakat yang telah harmonis dan damai. Hanya saja, ia menyatakan bahwa fakta politik SARA sebagai sesuatu yang sulit dihindari dan bahkan dianggap wajar. Memang kewajaran yang ia maksudkan adalah akibat dari model kompetisi terbuka, suatu model kompetisi yang berhadapan satu orang dengan satu orang lainnya, yang mana kondisi ini berakibat terbukanya ruang kritik terhadap figur calon kepala daerah.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh responden, politik SARA di Jawa Tengah dapat dilakukan oleh aktor seperti kandidat atau calon kepala daerah, partai politik, aktor politikus, tim pemenangan, tim konsultan, anggota organisasi massa, dan/atau organisasi massa. Partai politik, kandidat, aktor politikus, dan tim konsultan ahli kandidat adalah kelompok aktor yang berkepentingan untuk memperoleh kemenangan dalam kontestasi pilkada. Berkaca dari pengalaman Pilkada DKI, tidak tertutup kemungkinan salah satu dari kelompok ini juga memainkan peran politik SARA di Jawa Tengah. Beberapa responden yang menyatakan perihal aktor yang berpotensi menjadi pelaku politik SARA dalam kategori pelaku politik langsung di Jawa Tengah ini adalah Teguh Yuwono (akademisi Universitas Diponegoro), Fajar Saka (akademisi Fakultas Hukum STIKUBANG Semarang),



M. Khanafi (KPU Kudus), Dr. Tafsir (Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah), dan Nunik Sriyuningsih (Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Tengah).

Selain kelompok pelaku politik langsung, aktor yang berpotensi memainkan isu SARA dalam kontestasi politik di daerah Jawa Tengah adalah aktivis organisasi massa (ormas). Organisasi massa tersebut seperti Front Pembela Islam, GPK, kelompok pendukung *khilafah*, dan kelompok-kelompok yang dipandang responden berhaluan garis keras yang berbasis di Solo dan sekitarnya. Menurut sosiolog Undip, Yulianto, massa yang ikut serta dalam gerakan bela Islam di Jakarta beberapa waktu lalu banyak yang tidak tergabung di Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Mereka inilah kelompok aktor yang juga berpotensi untuk melakukan politik SARA bila terdapat kepentingan untuk mendorong suatu kandidat. Hal ini juga dikuatkan oleh Wakil Ketua Nahdhatul Ulama Jawa Tengah Nur Shoib, SH, MH.

Para responden memiliki pandangan yang juga bervariasi perihal kemungkinan politik SARA di DKI Jakarta akan menyebar di Jawa Tengah. Ada yang menyatakan fenomena SARA di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 tidak akan menular ke Jawa Tengah, namun ada pula yang menyatakan akan berpotensi menyebar tetapi masih dalam batas-batas rendah.

Misalnya Nur Shoib dari PW NU Jawa Tengah yang bahwa berpandangan isu SARA di DKI Jakarta tidak akan menyebar di Pilkada Jawa Tengah berikutnya. Nur Shoib menyatakan, "Saya kira kalau di Jawa Tengah, *enggak* lah. Yang penting penyelenggara pemilu secepatnya melakukan konsolidasi melibatkan seluruh unsur kemasyarakatan. Kita konsolidasi total mempersiapkan penyelenggaraan pemilu agar persoalan di DKI tidak merembet ke daerah termasuk mengundang parpol.



Berikan pemahaman kepada parpol agar tidak menggunakan isu SARA dalam pencalonan. Kalau semua bisa konsolidasi menyamakan persepsi bahwa kontestasi musiman ini jangan sampai mengorbankan dasar-dasar negara kita.”

Senada dengan Nur Shoib, Dr. Tafsir yang merupakan Ketua Muhammadiyah Jawa Tengah juga berpandangan bahwa isu SARA tidak perlu dikhawatirkan berlebihan pada perhelatan Pilkada Jawa Tengah. Ujar Tafsir, “Kalau ada calon lain non-Muslim, bisa jadi tidak akan mendapatkan suara terbanyak. Tapi tidak akan panas. Nyatanya kita di Solo juga pemimpinnya Nasrani. Karena beliaunya kan tenang. Menurut saya situasi DKI tidak akan terjadi di Jawa Tengah asal calonnya jangan gaya bicara yang liar, sekalipun non-Muslim”.

Sosiolog Undip M Yulianto menyatakan, sikap “*tetanggaan*” di tengah masyarakat sangat tinggi sehingga sikap *welas asih*, toleransi, hormat-menghormati menjadi sangat identik dengan masyarakat Jawa Tengah. Kondisi itu membuat politik SARA tidak akan laku di Jawa Tengah. Yulianto menegaskan, “Selama tidak menyinggung akan masih aman-aman saja. Katakanlah di Jakarta ada *statement*, kalau pemimpinnya bukan Muslim maka ketika meninggal tidak akan disalati. Tapi saya rasa tidak akan ada di Jawa Tengah karena *tetanggaan* di sini masih sangat kental.”

Penyelenggara pemilu KPUD Karanganyar Jawa Tengah, Sri Handoko juga memperkuat yang disampaikan M Yulianto. Handoko mengutarakan bahwa masyarakat Jawa Tengah sangat dewasa sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh isu SARA. Ia mengatakan, “Untuk wilayah Karanganyar, isu seperti di DKI kami rasa tidak akan terjadi pada Pilkada nanti. Karena karakter dan kultur masyarakat Karanganyar ini sendiri cukup dewasa.” Begitu juga pernyataan dari perwakilan KPU Kudus, M Khanafi.



Ia menegaskan, “Kudus saat ini hampir sama dengan daerah lain. Homogen. Jika ditarik dengan Jakarta, jauh.” Sedangkan dari KPU Tegal, Sukartono justru memberi penguatan agar tidak perlu terlalu khawatir dengan Pilkada Jawa Tengah. Ia percaya bahwa efek DKI tidak akan masuk ke Jawa Tengah.

Sementara itu, Djoko Haryono dari Kesbangpol Jawa Tengah menyampaikan bahwa kasus politik SARA itu terjadi karena ada faktor yang kasuistis, yakni pernyataan salah seorang kandidat. Seperti yang Djoko Haryono tekankan, “Kalau isu di DKI, karena ada api tentu ada asap. Ini jadi pembelajaran bagi Jawa Tengah agar isu DKI jangan terjadi di Jawa Tengah. Kita harus belajar dari apa yang terjadi di DKI.”

Hakim dari KPU Jawa Tengah memberi ulasan dari sudut lain. Baginya ada konteks pertarungan politik yang sangat kuat dalam Pilkada DKI sehingga hawanya sangat panas. SARA adalah salah satu obyek kampanye yang semakin mempertajam kompetisi politik tersebut. Hakim mengutarakan, “Kalau di Jakarta kan jelas, itu pertarungan politik. Kalau di Jawa Tengah, menurut saya kok lebih ke figur ya. Kalau memang figur itu baik dan bisa diterima, maka akan dipilih. Yang kedua adalah mesin, siapa yang mengusungnya. Sekarang menjadi latah orang mengatakan tentang kasus Jakarta. Saya pernah mengikuti seminar di Hotel Gracia bahwa kadang-kadang permainan media banyak orang lebay dan membesar-besarkan. Mengutip pernyataan Mas Prie GS, tidak ada data kok kalau orang yang memilih Ahok yang kemudian mati tetapi tidak disalati.”

Penegasan tidak akan menguatnya politik SARA disampaikan juga oleh Intelkam Polda Jawa Tengah, Edi Purwanto. Menurut perwakilan Intelkam Polda Jawa Tengah tersebut, politik SARA pada Pilkada DKI Jakarta tidak akan terjadi di Jawa Tengah karena semua *stakeholder* sudah paham bahwa penggunaan isu



SARA dilarang. Sementara itu, peserta pemilu seperti PKB dan PKS juga tidak yakin kalau politik SARA di Pilkada Jawa Tengah akan menguat. Perwakilan PKB menyatakan, “Dari dulu sudah ada kelompok namanya Gatara yang ajarannya *nyeleneh*. Ada FPI Khilafah bibit-bibitnya banyak. Akan tetapi kami melihat Jawa Tengah kompleksitas kehidupan sosialnya tidak serumit DKI. Di sini tingkat kejahatan, kemiskinan, kriminalitas, pengangguran, dan tingkat kehidupan sosial kultural seperti macet dan banjir tidak seperti di Jakarta. Ini kan sebenarnya bisa memprovokasi masyarakat juga. Di sini masih ada kelonggaran-kelonggaran di lingkungan. Di sini NU tinggi. Dalam konteks itu, NU yang bisa membantu pemerintah mengendalikan keadaan. Faktanya, kemarin perang melawan khilafah dan menggagalkan deklarasi FPI cukup masif. Kiai juga banyak yang tinggal di sini.” Pernyataan responden PKB itu menegaskan kembali bahwa meskipun ada ormas-ormas yang dikategorikan tidak moderat, tetapi karena kultur Jawa Tengah yang *guyub*, ditambah peran ormas Islam seperti NU sangat besar, potensi politik SARA itu diyakini tidak akan menyebar di Jawa Tengah.

Sementara itu, wakil dari PKS semakin meyakinkan bahwa Jawa Tengah tidak akan sesuai untuk politik SARA. Bahkan responden dari PKS mencontohkan Kota Solo di mana Walikotaanya adalah non-Muslim, namun tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dari politik SARA. Responden dari PKS mengatakan secara utuh, “Khusus di Jawa Tengah di Kota Solo juga sebagai daerah berbasis lascar, toh walkotnya non-Muslim. Sebenarnya secara konteks masyarakat sudah sangat terdewasakan.”

Hanya saja wakil dari PKS tersebut memberi dua catatan utama terkait bagaimana politik SARA itu bisa terjadi, yakni faktor keteledoran dari kandidat dan konstruksi dari media



massa/sosial. Pada poin pertama, justru pemicu (*trigger*) terkuat yang membuat gelombang protes besar-besaran adalah blunder salah satu calon kepala daerah. Sedangkan poin kedua adalah berhubungan dengan bagaimana satu isu diangkat dan dibesar-besarkan oleh media.

1.4 Identifikasi Aktor Politik SARA di Jawa Timur

Jawa Timur adalah sebuah provinsi yang menarik untuk dianalisis terkait dengan relasi SARA dan politik. Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur yang bersamaan dengan pemilihan kepala daerah di 18 kabupaten/kota. Jumlah penduduk Jawa Timur mencapai 38 juta jiwa, dengan kultur yang beragam, dan didominasi masyarakat santri bercorak Nahdhiyin yang hampir merata, tetapi juga terdapat kelompok abangan di beberapa kantong masyarakat Jawa Timur.

Dari penjelasan semua responden, baik dari forum diskusi kelompok terpusat ataupun wawancara mendalam, dapat ditarik benang merah bahwa responden telah memahami dengan baik apa batasan tentang SARA. Semua responden menyadari bahwa SARA senantiasa berhubungan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Politik SARA dipandang sebagai sesuatu yang bukan lahir dari masyarakat melainkan elite Terdapat pemahaman dari informan di Jawa Timur, sejatinya politik SARA bukanlah hal baru di Indonesia. Namun gelombang besar tentang politik SARA terjadi dalam momentum Pilkada DKI Jakarta 2017. Komisioner Bawaslu Jawa Timur, Sri Sugeng menyatakan, “Ini agak memanas politik di Indonesia karena imbas dari Pilkada DKI Jakarta”. Peristiwa politik SARA pada Pilkada DKI Jakarta



membuat pro-kontra di tengah masyarakat. Semua responden di Jawa Timur menyatakan ketidaksetujuannya pada politik SARA. Bahkan penyesalan mendalam atas kondisi buruknya politik SARA di DKI Jakarta mencuat dalam diskusi kelompok terpusat atau wawancara mendalam.

Prof Hotman, akademisi Universitas Airlangga, bahkan menyebut apa yang terjadi di Jakarta itu sebagai “barbarianisme politik.” Prof Hotman mengatakan, “Saya kira apa yang terjadi di Jakarta itu barbarianisme politik. Belum pernah terjadi dalam sejarah, berlangsung intensitas cepat, dan dipengaruhi oleh kelakuan para elite, saya tidak percaya itu dilakukan oleh rakyat.”

Selain betapa jauhnya proses pilkada DKI Jakarta dari nilai keadaban bangsa, Prof Hotman menegaskan bahwa politik SARA tidak dilakukan oleh rakyat, tetapi oleh elite. Apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat itu tidak benar-benar terjadi. Prof Hotman menyebutkan yang terjadi itu sebagai dunia “simulacra” belaka; kenyataan yang seakan-akan kenyataan, padahal hanyalah rekayasa belaka. Elite politik yang merekayasa, sementara rakyat adalah obyek rekayasa.

Simpulan penting Prof Hotman tersebut dikuatkan oleh Muzakir, akademisi Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Muzakir menyatakan, “Fenomena Jakarta sangat dahsyat dan brutal. Bagaimana politik identitas digunakan melakukan *black campaign* dan sebagainya, dan juga aktor-aktor politik termasuk di sini tentunya bukan rahasia lagi kalau kemudian masing-masing kubu, apakah itu partai politik atau pendukung, bahkan bisa jadi yang harus kita pertanyakan mungkin dalam perspektif akademik tim sukses juga ikut memproduksi bagaimana politik identitas sebagai alat untuk melakukan serangan kandidat yang satu dengan yang lain.”



Muzakir menggunakan diksi “brutal” untuk menyebut fenomena Pilkada DKI Jakarta, sedangkan Prof Hotman memakai istilah “barbarianisme”. Dua istilah tersebut untuk mengekspresikan betapa sangat disayangkan proses demokrasi di Jakarta berlangsung sedemikian rendah dari keadaban luhur bangsa. Fakta yang ditunjukkan oleh Muzakir, bahkan aktor pelaku politik SARA itu justru bisa berasal dari partai politik, pendukung, dan tim sukses. Mungkin sebagian masyarakat akan berpandangan wajar bila partai politik, pendukung, dan tim sukses melakukan segala cara dalam kampanye politiknya. Orientasi mereka adalah menang, apapun menjadi halal.

Realitas politik di sebagian aktor politik kita tentunya menyedihkan. Terlebih, mengutip akademisi Airlangga Pribadi dari Universitas Airlangga, politik SARA bahkan diproduksi oleh konsultan ahli yang memiliki latar belakang intelektual dengan bekal pendidikan setingkat master bahkan doktor –mereka sering disebut sebagai konsultan politik. Alih-alih memberikan nasihat politik yang berkeadaban, mereka justru memproduksi kampanye berbasis SARA. Seperti yang dikatakan oleh Airlangga Pribadi, “Dalam banyak hal itu dimainkan oleh kalangan konsultan, yang baru-baru ini membuat puisi yang ‘Ini Bukan Tanah Kami’ segala macam dengan maksud menghembuskan populisme sayap kanan.” Prof Hotman menyebut kelompok ini sebagai orang yang paling berdosa dan bertanggungjawab secara moral dan intelektual tentang apa yang telah mereka lakukan.

Salah seorang peserta FGD yang juga berprofesi sebagai tim konsultan politik dan juga tim ahli survei politik, Edi Marzuky dari Surabaya Survei Centre (SSC) tidak menampik adanya fakta keterlibatan tim survei atau tim ahli dalam produksi isu SARA. Menurut Edi Marzuky, tidak semua lembaga survei atau tim konsultan memiliki standar yang sama dalam bekerja.



Tidak sedikit lembaga survei yang tidak memperhatikan *code of conduct* dalam melakukan riset survei politik, misalnya soal metodologi. Juga terdapat lembaga survei yang tidak mencantumkan metodologi dalam melakukan publikasi hasil survei. Hal ini membuat semua tim konsultan dan tim survei dijadikan kambing-hitam.

Dalam forum diskusi kelompok terpusat, terjawab setidaknya ada dua faktor konteks munculnya politik SARA, yaitu faktor global dan faktor politik lokal. Muzakir, Airlangga Pribadi, Najib dari JPPR Jawa Timur, dan Awan Darmawan dari akademisi Unesa, berpendapat bahwa politik SARA tidak bisa dilepas dari konteks global di mana Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang mempertontonkan politik SARA begitu telanjang. Dengan perkembangan media yang sedemikian canggih, kita di Indonesia dapat mengikuti proses pemilihan presiden di Amerika Serikat tersebut. Dalam konteks ini, Muzakir menyatakan, “Sebenarnya fenomena yang terjadi di DKI tidak terlepas, saya ingin melihat secara global sebenarnya terjadi tidak di Indonesia saja, fenomena politik identitas di Amerika, kemenangan Donald Trump, orang sama sekali tidak memprediksi bahwa akan menjadi pemenang menjadi presiden, tapi kemudian justru prediksi berbalik arah. Dan kita bisa melihat fenomena di Brexit juga sama. Fenomena Emmanuel Macron versus Marine Le Pen (Perancis) yang kemarin, ini ternyata fenomena politik identitas juga menguak.”

Bahkan Najib dari JPPR mengatakan bahwa imbas politik SARA di Amerika Serikat sampai terjadi pembunuhan. Menurut Najib, “Kemenangan Donald Trump yang kemudian didapatkan oleh Donald Trump imbasnya jauh sampai panjang sampai terjadi pembunuhan, penembakan yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat sipil yang ada di sana.”

Awan Darmawan juga bersepakat bahwa politik SARA juga



cermin gejala global. Awan menyatakan, “Kita mengamati bahwa perkembangan kekuatan politik kubu kanan ini bukan hanya kemarin kasus Pilkada DKI saja. Di Filipina, di Amerika, di Perancis mengalami penguatan juga dari kelompok kanan”

Airlangga Pribadi membaca merebaknya kelompok sayap kanan (*right wing*) di pentas global tersebut berdampak juga ke Indonesia. Menurut Airlangga, kenyataan itu dapat terjadi karena faktor ketimpangan sosial dan ekonomi di hampir semua belahan dunia. Ada kelompok kecil penikmat kekayaan dunia, sementara terdapat kelompok besar warga dunia yang tidak dapat menikmati kekayaan. Airlangga mengatakan, “Dalam konteks problem-problem ketimpangan sosial itu menjadi persoalan yang masif. Kalau kita melihat data statistik, bahwa penguasaan 1% orang terkaya terhadap modal dan kapital 50% itu bukan hanya berlangsung di Indonesia, tetapi di negara Amerika dan negara-negara Eropa. Dan sekarang di *blogger-blogger* yang menyebar isu-isu SARA itu mereka yang tidak terserap dalam angkatan kerja yang sesuai dengan pendidikan mereka. Ini problem keresahan global yang menjadi pemicu kondisi mengapa kemudian model-model isu SARA ini menjadi laris.”

Menurut Airlangga Pribadi, kondisi sosial yang timpang itulah yang dimanfaatkan oleh para konsultan politik dan elite politik untuk membangkitkan politik SARA. Namun strategi politiknya tidak dengan membangun kelas perlawanan politik progresif yang menjawab mengapa ketimpangan sosial itu terjadi, namun yang dilakukan justru mengambil identitas sebagai faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial dan ekonomi. Airlangga Pribadi menyatakan, “Kita melihat adanya elite-elite politik, adanya beberapa hal, kelompok-kelompok konsultan politik dan aktivis-aktivis yang memanipulasi dan mengkomodifikasi keresahan-keresahan dan kecemasan-kecemasan dan tren



politik identitas tadi. Dalam bahasa politik itu yang disebut sebagai instrumentalisasi *right wing populism* (populisme sayap kanan).”

Sementara itu, ilmuwan politik Kris Nugroho dari Universitas Airlangga memberikan pandangan dari sisi politik lokalnya. Menurut Kris Nugroho, model pemilihan kepala daerah langsung saat ini membuat pertarungan politik sangat terbuka dan berhadapan-hadapan antar pendukung, apalagi jika kandidat hanya dua pasangan calon. Yang terjadi kemudian adalah upaya saling menjatuhkan kandidat lawan dari masing-masing pendukung. Padahal pendukung salah satu calon memiliki irisan dengan kelompok sosio-religius, kelompok identitas seperti suku/etnis, dan basis-basis informal lainnya. Dengan demikian, politik SARA membuat gesekan antarpengukung tersebut menjadi semakin terbuka di tengah kehidupan masyarakat. Kris Nugroho menyatakan, “Kalau pilkada langsung berhadapan, begitu pula demarkasi antara pendukung kandidat sangat tajam sekali. Nah inilah yang membuat pertarungan yang masuk ke arena habis-habisan. Termasuk kalau saya amati penggunaan instrumen mobilisasinya. Kita ketahui bahwa ada semacam pergeseran mesin mobilisasi. Sejak pencalonan kita mengarah pada personalisasi figur aktor itu instrumen mobilisasi sudah lama tidak menggunakan partai, partai hanya tumpangan, baik pada legislatif maupun juga pilkada. Selebihnya yang bekerja mungkin 80%, yaitu mesinnya calon secara pribadi, baik tim sukses maupun jaringan-jaringan calon.”

Faktor global dan lokal penguat merebaknya isu SARA tersebut semakin didukung oleh adanya teknologi media yang semakin canggih, mudah, dan murah. Sayangnya perkembangan media massa, baik media *mainstream* seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah, ataupun media sosial alternatif seperti



facebook, whatsapp, twitter, blog, dan sebagainya tidak didukung oleh kapasitas kecerdasan literasi di tengah masyarakat. Akibatnya informasi yang tidak benar atau biasa disebut *hoax*, informasi menyesatkan, informasi yang mengujar kebencian, kerap kali dikonsumsi tanpa filter oleh masyarakat kita.

Seperti yang diungkap oleh Awam Darmawan, pakar komunikasi Universitas Negeri Surabaya, “Perkembangan teknologi komunikasi media memiliki dua sisi. Pertama *intended consequence*; bahwa ada memang harapan positif dalam perubahan teknologi komunikasi membuat lebih hidup efisien, membuat kita gampang untuk mengakses sumber informasi, membuat kita lebih mudah berkomunikasi, membangun suatu jejaring masyarakat digital sehingga kita bisa memiliki fragmentasi informasi yang tidak diatur oleh kepentingan media *mainstream* seperti televisi dan lain sebagainya. Tapi kita tidak dipungkiri bahwa ada *unintended consequence* di mana perkembangan teknologi komunikasi lebih cepat dari pada perkembangan masyarakat dan struktur sosialnya, itu terjadi dalam kasus DKI Jakarta kemarin.”

Hal senada disampaikan oleh Elly dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur. Menurut Elly, masyarakat kita sedang menuju proses literasi digital, tetapi proses itu masih berlangsung dan ternyata masyarakat belum siap menghadapi turbulensi informasi di media. Elly menambahkan, kondisi belum siapnya masyarakat justru dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan politik untuk menyuarakan isu SARA dan ujaran kebencian.

Elly mengatakan, “Fase literasi terlewati kemudian masyarakat kita sudah dihadapkan pada gempuran media-media sosial atau perkembangan teknologi yang begitu dahsyat sehingga saya melihat masyarakat kita belum siap. Saya juga



melihat, oke mungkin di Amerika, Jerman, Perancis, politik SARA itu juga ada, bahkan mungkin masif kemarin, tetapi dampaknya tidak seperti terasa seperti yang terjadi di Indonesia, seperti di DKI. Siapa yang mengkapitalisasi tentu ada aktor-aktor politik yang berkepentingan di situ dan mereka juga menggunakan media, baik media *mainstream* seperti televisi dan media sosial yang hari ini sangat menjadi sopir kita sehari-hari.”

Undang-Undang Penyiaran dinilai tidak dapat berfungsi banyak karena belum mengantisipasi soal media sosial yang sedemikian masif. Begitu pula media seperti *youtube* yang juga jamak digunakan sebagai media kampanye. Menurut Elly, Undang-Undang Penyiaran bahkan belum direvisi, masih kalah prioritas dengan Undang-Undang Pemilu. Pengalaman Elly di Panwas Kabupaten/Kota, kemampuan Panwas untuk mengawasi hanya bisa mengendalikan media sosial yang terdaftar. Sementara yang tidak terdaftar sangat banyak dan tidak terkontrol. Justru itu yang menjadikan urgensi revisi Undang-Undang Penyiaran sangat penting dan kian mendesak.

Memperkuat Elly, Najib dari JPPR Jawa Timur memberi tambahan informasi bahwa media sangat terbuka dalam memproduksi wacana dan kemudian menyebarkan ke ruang publik. Seperti kasus yang menyangkut Ahok, ada campur-tangan media yang kemudian mencoba untuk mem-*blowup* kasus tersebut. Dalam perjalanan Pilkada DKI Jakarta, hampir satu bulan penuh media-media, baik media elektronik, media-media televisi pada khususnya, memperbincangkan pro-kontra tentang kasus tersebut dan cenderung bukan mencari solusi jalan tengah, tetapi mencari persoalan-persoalan yang mampu memproduksi riak-riak di masyarakat. Misalnya saja, hampir satu minggu penuh Kompas TV dan TV One menayangkan debat pro dan kontra Ahok, dengan *framing* yang berlawanan.



Dampak sosial kasus tersebut kemudian juga terjadi di kalangan perempuan dan anak. Hal ini dipotret oleh Afni, aktivis perempuan dan anak Jawa Timur. Afni mengutarakan, "Kebetulan di organisasi saya terkait isu perempuan ibu dan anak. Saat ini kita tahu televisi dan *smartphone* hampir semua orang punya, *gak* usah yang berumur seperti misalnya 17 tahun ke atas memegang *handphone* dan lihat TV. Sekarang anak-anak pun dikasih sama orang tua fasilitas *handphone* untuk dibawa ke sekolah, dari situ akar-akarnya isu-isu ini muncul. Di antara perluasan media ini isu-isu SARA di DKI ini muncul. Tidak usah di TV, mungkin di media sosial WA, BBM, atau sekarang yang lagi tren *Instagram*, *youtube*. Dari semua media sosial itu, yang saya pernah survei penggunaannya mayoritas anak-anak yang belum usia 17 tahun, bahkan kelas SD, SMP itu dia bisa akses, dan bahkan ikut-ikutan pencermatan isu SARA. Misalnya dia membuat gambar kalau kita sebut dalam bahasa gaulnya adalah *meme*, misalnya kita membandingkan antara Ahok dan juga pasangan yang Muslim seperti itu, ataupun saya tidak akan memilih calon non-Muslim, ataupun dan sebagainya yang sebenarnya masuk dalam wilayah SARA."

Aktivis Fatayat Jawa Timur, Aina Amalia juga menegaskan kerisauannya perihal dampak SARA tersebut pada perempuan. Aina melihat sebagaimana Pilkada Jawa Timur sebelumnya, ada beberapa aktor yang menarik-narik konstituen perempuan untuk beberapa kepentingan pemilu kepala daerah. Ini berimbas pada konflik horisontal di tingkatan massa perempuan itu. Dampak horisontal tersebut juga berimbas di media sosial sehingga berimbas pada tatanan masyarakat juga.

Merespons kondisi tersebut, ormas ataupun partai politik di Jawa Timur yang menjadi narasumber penelitian ini semuanya menolak penggunaan isu SARA sebagai basis pemenangan



kepentingan politik. Partai politik yang diwawancarai oleh tim peneliti adalah PDIP, Partai Demokrat, PKB, dan Gerindra. Sedangkan ormas yang diwawancarai adalah Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.

Dari proses wawancara mendalam tersebut, NU dan Muhammadiyah menyadari bahwa peran ulama sangat berat dalam upaya memberikan edukasi politik yang baik. Kedua ormas ini telah membuktikan bagaimana perannya dalam memberikan pencerahan di masyarakat. Muhammadiyah dengan sekolah-sekolah, pengajian rutin, pertemuan formal, berupaya memberikan pemahaman yang baik tentang politik. Hal itu diungkap oleh Dr Biyanto. Demikian halnya Prof Muzaki dari PW NU Jawa Timur yang menyatakan bahwa NU tetap dengan tegas memperjuangkan Islam moderat Ahli Sunnah wal Jamaah. Modal kultural NU seperti pesantren, dan tentu para kiai di Jawa Timur, dimanfaatkan untuk melakukan komunikasi positif antara jamaah dan ulamanya. Menurut Prof. Muzakki, justru persoalan yang datang itu bukan dari aktor Muhammadiyah dan NU, tetapi dari kelompok yang tidak berafiliasi dengan dua ormas tersebut. Kelompok-kelompok itulah yang mudah disusupi dengan paham Islam fundamentalis dan radikal.

Selain itu, semua aktivis partai politik di Jawa Timur juga merasa bahwa politik SARA bukan jalan-baik dalam politik. PDIP, sebagaimana disampaikan Ibu Utari, menegaskan bagaimana sikap kemajemukan PDIP. Bagi PDIP, Pancasila dan UUD 1945 adalah pegangan mereka. Sementara partai politik lain seperti Partai Demokrat, Gerindra, dan PKB juga menyatakan pandangan yang sama. Hanya saja, Ketua PKB Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar, menyatakan bahwa karena Nahdhatul Ulama sangat besar di Jawa Timur, PKB harus mempertimbangkan identitas itu. Abdul Halim Iskandar menyebutnya sebagai kearifan lokal,



di mana politik harus mempertimbangkan mayoritas basisnya. Bagi PKB hal ini bukanlah SARA, melainkan memperhatikan kearifan lokal.

Sementara itu, Renvil dari Partai Demokrat menyatakan bahwa partainya tidak melihat faktor identitas dalam pencalonan, melainkan lebih pada faktor popularitas, integritas, dan *track record*. Begitu juga perwakilan Partai Gerindra, Hadinuddin yang menyatakan bahwa survei untuk melihat popularitas dan elektabilitas calon sangat menentukan kriteria calon kepala daerah. Dalam amatan mereka, di Jawa Timur tidak akan terjadi politik SARA seperti DKI Jakarta. Faktor determinan yang muncul adalah kuatnya pengaruh ormas Nahdhatul Ulama di Jawa Timur sehingga susah ditembus oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab.

1.5 Identifikasi Aktor Politik SARA di Kalimantan Barat

Upaya mengidentifikasi aktor politik SARA di Kalimantan Barat, sebagaimana di provinsi lain, dilakukan dengan menggelar diskusi kelompok terfokus dan wawancara mendalam. Dalam diskusi grup terfokus, mengemuka pendapat bahwa isu SARA memang isu yang sangat diminati dan mudah dikerahkan. Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Umi Rifidiyawaty mengharapkan agar elite politik tidak terlalu berlebihan mengelola isu SARA dalam politik yang malah berujung pada konflik. Kondisi tersebut pada ujungnya dapat memicu perpecahan bangsa.

Hal senada disampaikan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Barat MS Budi. Dia mengatakan, identitas adalah hal yang tidak dapat dilepaskan dari dalam politik. Jurnalis Tribun Pontianak Suroso pun mengatakan, identitas memiliki pengaruh besar terhadap



pembentukan sikap publik dalam berbangsa dan bernegara. Aktivistis LIPD Glorio Sanen menuturkan, sah saja bila seseorang menentukan pilihan politiknya berdasarkan kedekatan emosional, termasuk soal identitas SARA. Akan tetapi, tentu hal itu bukan prioritas utama dalam menentukan pilihan. Adapun, anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Krisantus Heru Siswanto menyatakan, sebagai pengawas pemilu, narasumber memahami bahwa penggunaan isu SARA dalam kampanye pilkada adalah hal yang dilarang Undang-Undang. Akademisi Untag bahkan menyatakan, penggunaan identitas SARA dalam kancah politik merupakan kemunduran politik.

Di sisi lain, partai politik tidak menyetujui penggunaan isu SARA dalam politik. Seperti yang disampaikan pengurus DPD Partai Golkar Kalimantan Barat Mustafa MS dan pengurus PDIP Maskendari. Hal itu disetujui pula oleh tokoh adat Dayak Frans Asok.

Ironisnya, tetap ada potensi penggunaan isu SARA dalam pilkada di Kalimantan Barat. Hanya saja identitas yang lebih menonjol adalah kesukuan ketimbang agama. Hal itu mengingat terdapat lima etnis yang secara jumlah merupakan mayoritas di Kalimantan Barat, yaitu Dayak, Melayu, Jawa, Tionghoa, dan Madura. Selain itu, ada pula etnis Bugis, Sunda, Batak, Dayak, dan Banjar.

Menurut Krisantus Heru Siswanto dari Bawaslu Kalbar belajar dari pengalaman pilkada di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2008, penggunaan isu SARA dalam Pilkada di Kalimantan Barat masih mungkin terjadi. Hal itu diperkuat oleh Kristianus Atok ilmuwan sosial Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) bahwa potensi politik SARA sangat mungkin terjadi sekalipun memang eskalasi konfliknya tidak akan sebesar kasus di Jakarta. Sementara Djumadi Ilmuwan Politik Untag menyatakan, saat



pengumpulan data dilakukan, mulai ada gejala perpecahan di masyarakat yang tampak pada saling kecurigaan antar-anggota masyarakat.

Potensi politik identitas SARA juga ditangkap oleh komisioner KPU Kota Pontianak Abdul Latif, aktivis JPPR Darwis, Komisioner KPU Kabupaten Kubu Raya Gustiar, Umi Rifidiyawaty, MS Budi, aktivitis Elpagar Fubertus Ipur, aktivis JARI Faisal, pejabat Polda Kalimantan Barat AKBP Wedy Mahadi, jurnalis Tribun Pontianak Suroso, Sekretaris MABM Zulfidar Zaidar, Mustafa MS, Maskendari, dan pengurus Partai Gerindra Hendri Makaluas serta tokoh adat Frans Asok.

Frans Asok selaku representasi tokoh adat bahkan menyampaikan, sudah ada potensi elit politik akan bermain dan mengkondisikan agar Kalimantan Barat tidak aman. Menurutnya, pemilih politik di Kalimantan Barat belum rasional dan masih mengandalkan primordial. Krissantus dari Bawaslu Kalimantan barat menegaskan isu-isu SARA itu berpotensi diusung oleh tim pemenangan pasangan calon kepala daerah. Sedangkan Kristianus berpendapat, aktor politik yang mungkin menggunakan politik identitas adalah para politisi yang memiliki latar belakang organisasi keagamaan. Menurut Abdul Latif, Djumadi, dan Darwis; penggunaan politik identitas dilakukan oleh elit politik di daerah. Hal yang sama juga disampaikan AKBP Wedy Mahadi, Fran Asok, Gustiar, Umi Rifidiyawaty, dan MS Budi. Senada dengan itu, aktivitis Elpagar Fubertus Ipur menyatakan, isu SARA akan digunakan oleh para kandidat kepala daerah langsung untuk memenangkan dirinya. Lain halnya dengan Mustafa MS dari Partai Golkar. Menurutnya, pemimpin daerahlah yang berpotensi menjadi aktor pengguna isu SARA dalam penyelenggaraan Pilkada. Selain itu, kelompok berbasis kesukuan juga sangat mungkin menggunakan isu SARA.



Soal media penyebaran isu SARA dalam pilkada, Krisantus mengatakan, isu SARA dapat disebarakan melalui mimbar keagamaan dan pemberitaan di media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Narasumber lainnya, Abdul Latif (KPU Kota Pontianak), Djumadi (akademisi Bidang Politik/Untag), Darwis (JPPR), Gustiar (KPU Kabupaten Kubu Raya), Umi Rifidiyawaty (KPU Provinsi Kalimantan Barat), MS Budi (KIPD Provinsi Kalimantan Barat), Fubertus Ipur (Elpagar), dan Faisal (JARI) berpendapat bahwa media yang berpotensi digunakan untuk menyebarkan kampanye berbasis SARA adalah media sosial.

1.6 Identifikasi Aktor Politik SARA di Sulawesi Utara

Untuk memperoleh gambaran mengenai identifikasi aktor politik SARA di Sulawesi Utara, tim peneliti memberikan stimulasi melalui pimpinan Bawaslu Sulawesi Utara Johny A. Suak. Johny menyampaikan, penggunaan politik identitas akan lebih menguat menjelang Pilkada dan Pemilu Presiden (Pilpres). Politik identitas tidak hanya menyangkut agama saja, melainkan juga suku. Politik identitas pun bukan hanya digunakan dalam pengisian jabatan politik, namun juga jabatan birokrasi seperti pengisian jabatan SKPD.

Dari perspektif agama, Sulawesi Utara sebenarnya adalah daerah yang homogen. Namun, wilayah ini cukup heterogen dalam hal suku. Terdapat setidaknya empat etnis utama, yaitu Minahasa, Sangir Talaud, Bolaang Mongondow, dan Gorontalo. Selain itu, ada pula etnis Tionghoa dan etnis lainnya. Menurut para responden, hal inilah yang dapat menjadi politik identitas di Sulawesi Utara.

Mengenai penggunaan isu SARA dalam proses demokrasi,



kebanyakan responden tidak setuju jika isu SARA digunakan dalam pemilu dan pilkada, terutama dalam menentukan pilihan saat pemungutan suara. Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Reidy Sumual menyatakan, dalam sebuah proses demokrasi, pemilih dapat menjadi bingung dalam menentukan pilihannya terkait dengan identitas kandidat yang akan dipilih.

Akademisi Maria Henny Pratikno antropolog Universitas Sam Ratulangi mengatakan, setiap orang memiliki sifat primordial yang dibawa sejak lahir. Di Sulawesi Utara, tuturnya, sifat primordialisme masih nyata, terutama menyangkut suku, agama, dan ras. Hal itu, menurut Henny dapat muncul ke permukaan setiap seseorang diberi umpan untuk berbicara tentang identitas yang sama dengan lawan bicaranya. Hanya saja, untungnya, pembicaraan identitas SARA itu tidak memunculkan gesekan yang signifikan.

Ketika responden ditanya apakah ada potensi penggunaan politik SARA dalam gelaran demokrasi di Sulawesi Utara, sebagian besar responden menjawab sangat kecil kemungkinan tersebut. Henny mengatakan, mayoritas masyarakat Sulawesi Utara sudah teredukasi dengan baik sehingga memiliki logika berpikir yang rasional. Bahkan, dikenal istilah “orang Sulut sulit disulut”.

Dia memaparkan sejarah konflik yang terjadi di daerah yang mengapit Sulawesi Utara, yaitu Kota Ambon dan Kota Poso. Sulawesi Utara menjadi istimewa lantaran daerah ini tidak ikut terpapar konflik sosial. Hal itu, menurut Henny, bisa terjadi karena tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh formal di Sulawesi Utara menjalankan fungsinya untuk menjalin komunikasi yang positif dengan semua anggota masyarakat.

Komisioner KPU Sulawesi Utara Facruddin Nuh mengatakan, ada potensi penggunaan isu SARA dalam pilkada. Hanya saja



potensi tersebut kecil saja. Provokasi isu SARA menyebar lebih cepat dengan medium media sosial, padahal akses media sosial di sebagian besar wilayah Sulawesi Utara tidak mudah. Pasalnya, ujar Fachruddin, banyak daerah di Sulawesi Utara yang sulit menjangkau jaringan telekomunikasi dalam jaringan, misalnya daerah Talaud. Hal sebaliknya disampaikan Ketua Bidang Badan Pemenangan (BP) Pemilu DPD PDIP Sulawesi Utara, Lucky Senduk. Menurutnya, karena di Manado jaringan telekomunikasi lebih kuat, ada potensi isu SARA digunakan dalam pilkada.

Sedangkan aktivis Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Syahrul Setiawan mengatakan, berdasarkan pengalaman pemilihan walikota dan wakil walikota di Manado, politik identitas masih dimainkan, terutama dalam hal etnis. Hanya saja, memang penggunaan politik identitas di Manado tidak sekeras yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta.

Hal yang hampir senada disampaikan Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Taufiq. Dia mengatakan, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang suka mengikut arus. Dalam konteks ini, arus yang dimaksudnya adalah penggunaan isi SARA dalam pilkada. Meski hanya dalam skala kecil, ada potensi aktor politik di Sulawesi Utara akan menggunakan isu SARA dalam pilkada, menduplikasi kesuksesannya di Jakarta.

Pendapat yang sama juga disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Sulawesi Utara Erick Kawatu. Aktor politik di Sulawesi Utara akan melihat bahwa penggunaan isu SARA sangat efektif memenangkan calon tertentu dalam pilkada. Karena itulah, strategi itu yang akan ditiru.

Nada yang lebih optimistis dihembuskan aktivis Gerakan Angkatan Muda Indonesia Melky Pangenanan. Menurutnya, apa yang terjadi di DKI Jakarta tidak akan terjadi di Sulawesi Utara.



Justru, jika ada konflik di DKI Jakarta, masyarakat di Sulawesi Utara akan meredamnya. Ia mencontohkan, saat Pilkada Kota Bitung, anggota DPD RI Aryanthi Baramuli Putri tidak diserang dengan isu SARA meski yang bersangkutan merupakan seorang Muslim. Masyarakat Bitung menilai Aryanthi dari jejak rekamnya selama menjadi anggota legislatif.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara Syaban Mauluddin mengatakan, kesuburan tanah dan tingkat intelejensi masyarakat Sulawesi Utara menjadi faktor yang mampu menekan penggunaan isu SARA dalam pilkada di daerah itu. Selain itu, kerja sama seluruh umat beragama di Sulawesi Utara juga memiliki peran besar dalam meredam politik identitas dalam demokrasi.

Adapun soal aktor yang berpotensi menggunakan isu SARA dalam pilkada, Erick Kawatu anggota KPID Sulawesi Utara mengatakan bahwa politisi, kandidat peserta pilkada, dan tim pemenangan adalah pihak yang paling mungkin menggunakan isu SARA. Para aktor tersebut akan menggunakan medium media sosial untuk menyebarkan isu SARA. Selain itu, tim pemenangan juga akan menggunakan medium luar jaringan (*offline*) dengan menemui masyarakat secara langsung (tatap muka).

Hal itu diamini jurnalis Tribun Manado Filip. Dia mengatakan, penyelenggara pemilu perlu mewaspadaai media arus utama (*mainstream*) dalam jaringan (*online*) dan media sosial. Penyelenggara pemilu harus bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk meredam penyebaran isu SARA, terutama terkait ujaran kebencian di media. Filip menyarankan agar kepolisian menindaklanjuti semua laporan dugaan tindak pidana ujaran kebencian.

Wakil Rektor II Universitas Sam Ratulangi, Flora Kalalo mengatakan, untuk meredam penggunaan isu SARA dalam



pilkada diperlukan peranan pengawasan yang maksimal. Bawaslu harus sudah mengambil langkah tindak lanjut jika memang mulai ada percikan kecil isu SARA. Yang terpenting, kata Flora, penegakan hukum dalam koridor yang jelas tanpa intervensi untuk meredam isu SARA.

Agamawan Janny Rende mengatakan, pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dapat menjadi senjata untuk menangkis penggunaan isu SARA dalam pilkada. Hal itu diyakini karena masyarakat Sulawesi Utara masih menghormati dan mendengarkan tokoh-tokoh tersebut.

Aktifis IMM Taufiq mengatakan, karena penyebaran isu SARA banyak dilakukan di media sosial, diperlukan penguatan di bidang teknologi informasi pada penyelenggara pemilu. Selain itu, pada setiap penyelenggaraan pilkada, sebelum tahapan pencalonan, Bawaslu disarankan melakukan identifikasi terhadap bakal calon, terutama calon yang berlatar belakang tokoh agama atau tokoh adat tertentu. Menurut Taufiq, tokoh agama dan tokoh adat berpotensi menggunakan politik identitas dalam kampanyenya.

**BAB
3****KEBERPIHAKAN,
POTENSI, DAN
ANTISIPASI
POLITIK SARA**

Bagian ini menyajikan tentang bagaimana peta keberpihakan responden terkait isu SARA. Setelah uraian mengenai keberpihakan aktor strategis dalam hal isu SARA tersebut, dipaparkan potensi isu SARA di enam daerah yang terpilih sebagai lokasi penelitian berikut antisipasi yang perlu dilakukan, yakni bagaimana upaya tiap aktor dalam menyelesaikan masalah ketika isu SARA terjadi dan/atau belum terjadi dalam ruang politik. Antisipasi tersebut bisa berbasis pengalaman praktik di lapangan pada masing-masing daerah atau juga antisipasi berbasis pemetaan masalah yang dialami oleh tiap daerah.

2.1 Sumatera Utara

Seluruh *stakeholder* di Sumatera Utara bersepakat tidak setuju isu SARA dijadikan sebagai alat politik, khususnya dalam Pilkada. Lantas bagaimana potensi isu SARA digunakan dalam Pilkada Sumatera Utara 2018? Berdasarkan informasi yang terangkum selama proses penelitian, potensi penggunaan



isu SARA dalam Pilkada Sumatera Utara merupakan efek dari Pilkada DKI Jakarta, meskipun tidak akan separah yang terjadi di Jakarta. Keyakinan itu didasari pandangan bahwa tingkat toleransi di tengah masyarakat Sumatera Utara masih tinggi.

Aktor yang berpotensi menggunakan isu SARA di Sumatera Utara adalah partai politik itu sendiri. Namun, ada aktor-aktor lain yang turut berperan, yaitu akademisi dan lembaga survei yang menempati posisi sebagai tim konsultan ahli. Kelompok aktor yang memproduksi isu SARA dalam ruang politik daerah tersebut biasanya memanfaatkan media massa dan atau media sosial sebagai alat untuk menyebarluaskan kampanye berbasis SARA di ranah kompetisi politik. Sumber informasi penyebaran isu SARA tersebut di antaranya media sosial seperti facebook dan bbm, kemudian media *mainstream* (cetak dan elektronik), dan juga media komunikasi seperti *whatsapp group*. Namun perlu menjadi perhatian juga bahwa ceramah-ceramah politik di rumah ibadah merupakan bagian dari ajaran agama sehingga perlu untuk diperhatikan apabila hal tersebut dipelintir oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Terkait pandangan tersebut, beberapa partai politik utama seperti Partai Golkar dan PDIP cenderung menyatakan tidak setuju terhadap penggunaan isu SARA. Pembelaan yang disampaikan Partai Golkar, penggunaan isu SARA sulit dicari dan dilacak siapa aktor utama yang mendistribusikan isu-isu politik tersebut. Perwakilan PDIP Sumatera Utara menyebutkan, praktik politik SARA pernah terjadi juga di Sumatera Utara pada Pilkada Wali Kota Medan pada tahun 2010. Saat itu, penggunaan isu SARA terjadi melalui penyebaran QS Al Maidah: 51 melalui pamflet-pamflet kepada masyarakat. Merujuk pernyataan responden dari PDIP tersebut, bukan partai politik yang menjadi aktor utamanya, melainkan masyarakat yang sulit untuk dilacak



siapa sesungguhnya aktor utamanya. Responden dari PDIP juga menyatakan, politik SARA bukanlah suatu strategi pemenangan pilkada. Akan tetapi isu SARA akan selalu ada, khususnya ketika pasangan calon yang berkompetisi berbeda secara suku dan agama.

Partai Golkar pun menyatakan tidak menggunakan isu SARA dalam pemenangan pilkada, melainkan lebih pada figur calon, namun tetap memperhatikan kondisi masyarakat. Besar atau kecilnya peluang untuk menang tetap dipertimbangkan dan diperhitungkan karena bagaimanapun pilkada tetaplah pertarungan memperebutkan kekuasaan. Kedua partai politik tersebut menyatakan bahwa upaya yang perlu dilakukan oleh semua pihak ketika isu SARA menjadi perhatian bersama adalah dengan mengedepankan toleransi di masing-masing pihak.

Dari informasi yang disampaikan oleh responden dari peneliti di lapangan, langkah antisipasi yang disarankan kepada Bawaslu dalam merespons terkait penggunaan isu SARA dalam Pilkada adalah sebagai berikut:

- Penyelenggara perlu memperjelas mengenai batasan dakwah yang dilakukan oleh pemuka agama mengenai politik. Jangan sampai para pemuka agama menjadi takut untuk berdakwah, tetapi tidak juga melanggar aturan.
- Bawaslu harus tegas dalam menindak semua pelanggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Harus ada tindakan tegas ketika muncul aksi di tempat ibadah.
- Bawaslu juga perlu tegas terhadap media. Jangan sampai media sembarangan memberitakan informasi yang memprovokasi dan menimbulkan benturan di tengah masyarakat.



- Bawaslu dan KPU harus sering berkoordinasi dengan pihak terkait, khususnya dalam menangani pelanggaran, menertibkan baliho kampanye yang melanggar.

2.2 Jawa Barat

Terkait pendapat tentang penggunaan isu SARA dalam Pilkada, seluruh peserta FGD dan narasumber *indepth interview* menyatakan tidak setuju dengan penggunaan isu SARA dalam Pilkada Jawa Barat 2018. Meskipun demikian, dalam konteks momentum Pilkada 2018 di Jawa Barat, sebagian besar peserta FGD berpendapat bahwa potensi SARA berpotensi akan muncul dengan tingkat yang relatif sedang.

Berdasarkan informasi responden, pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 pernah muncul isu SARA. Hal itu terjadi pada salah satu kandidat dari PDIP yang dipersepsikan identitas kandidatnya dekat dengan ideologi komunisme. Memang hal itu tidak berhubungan dengan identitas agama, suku, atau etnis; persinggungannya terjadi pada aras persepsi ideologi.

Selama ini isu SARA yang muncul pada setiap momen Pilkada di Jawa Barat lebih terkait dengan isu antar golongan dalam kalangan internal Muslim. Misalnya adanya isu aliran Syiah atau Wahabi. Pada taraf tertentu, isu SARA dari aspek kesukuan juga berpotensi muncul. Hal ini disebabkan oleh latar belakang calon kepala daerah yang sama-sama beragama Islam dan bersuku Sunda. Meskipun semua kandidat berlatar belakang suku Sunda, tetap saja ada kemungkinan muncul variasi latar belakang Sunda tersebut. Misalnya, salah seorang calon kepala daerah dikhawatirkan membawa aliran Sunda Wiwitan yang cenderung terpengaruh oleh kepercayaan animisme. Dengan



demikian, walaupun secara umum relatif damai, tetapi bisa dikatakan kemungkinan ada semacam potensi isu SARA yang akan muncul di masyarakat terkait dengan persoalan isu kultural antar golongan suku (isu Sundawi Wetan) dan antar-golongan agama (isu aliran Syiah, Wahabi) pada saat penyelenggaraan Pilkada Jawa Barat.

Muncul juga kekhawatiran sebagian responden mengenai adanya upaya dari pihak-pihak luar untuk mengadaptasi pola-pola politisasi SARA seperti yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta untuk dilakukan di Jawa Barat. Pertanyaannya kemudian adalah siapakah aktor yang berpotensi untuk menduplikasi isu SARA pada Pilkada DKI ke Pilkada Jawa Barat? Dari penjelasan responden, aktor yang berpotensi menggunakan isu SARA adalah tim sukses dan pasangan calon, tokoh ormas keagamaan, tokoh ormas kepemudaan, kelompok komunitas “dadakan”, dan media massa yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung.

Adapun sumber informasi penyebaran isu SARA dapat melalui beberapa saluran seperti berikut:

- Melalui forum keagamaan, misalnya Majelis Ta'lim, kegiatan pengajian di masjid, dan lain sebagainya.
- Melalui pertemuan alumni, dan arisan.
- Melalui media massa cetak dan elektronik.
- Media sosial karena persebarannya yang sangat kuat dan sulit untuk dibendung.
- Aplikasi khusus yang dirancang untuk mengarahkan orang ke salah satu figur calon kepala daerah.
- Melalui selebaran serta plakat di tempat-tempat strategis.



Terkait potensi parpol dalam menggunakan politik SARA dalam pemenangan calon pada Pilkada, narasumber dari para pengurus partai politik di Provinsi Jawa Barat menyatakan tidak akan menggunakan isu SARA dalam kampanye pilkada di Jawa Barat tahun 2018 karena praktik seperti itu dipandang akan menciptakan perpolitikan menjadi tidak sehat. Dalam menentukan pasangan calon, sebagian besar partai politik menyatakan tidak menjadikan latar belakang SARA sebagai pertimbangan utama. Kemampuan atau kompetensi, visi untuk membawa Jawa Barat lebih maju, serta popularitas dan elektabilitas menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan calon. Beberapa partai politik, seperti PDIP dan Golkar, menyatakan bahwa calon Gubernur diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Lalu bagaimana langkah antisipasi yang perlu dilakukan oleh aktor-aktor utama di Jawa Barat dalam merespons potensi penggunaan isu SARA pada Pilkada Jawa Barat 2018?

- Dalam konteks antisipasi penggunaan isu SARA tersebut, responden utama penelitian menyarankan perlunya dilakukan beberapa langkah antisipasi oleh Bawaslu.
- Menjadi partner yang baik bagi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi Pilkada di Jawa Barat.
- Dari instansi pemerintah, terutama penyelenggara pemilu, harus memberikan pemahaman kepada masyarakat, yakni dengan mencerdaskan pemilih melalui media sosial.
- Bawaslu harus menjadi pusat informasi tentang apa yang beredar di masyarakat selama Pilkada dan Bawaslu harus eksis dalam mengawasi media sosial.
- Penyelenggara pemilu harus semakin responsif terhadap perkembangan informasi yang dijadikan media kampanye oleh para pasangan calon.



- Bawaslu harus lebih intens mensosialisasikan peraturan dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tentang bagaimana pilkada yang baik yang bisa diterima dan cara berdemokrasi yang baik

2.3 Jawa Tengah

Merujuk sejarah, konflik SARA dalam skala besar tidak pernah terjadi di Jawa Tengah. Konflik antarkelompok pernah terjadi di Jepara dan Rembang, yaitu antara nelayan dan buruh tambang, namun hal itu bisa diselesaikan dengan baik. Pada ranah politik, isu SARA pernah dipakai pada Pilkada Kota Solo Tahun 2015 saat pencalonan FX Hadi Rudyatmo yang beragama Katolik dan Pilkada Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 dengan calon Budhi Sarwono alias Wing Chin dengan latar belakang etnis Tionghoa. Akan tetapi penggunaan isu SARA di kedua daerah tersebut tidak menimbulkan efek besar karena keduanya tetap terpilih sebagai pemenang. Selain itu, media tidak memberitakan secara luas dan masif pertarungan politik di Solo dan Banjarnegara kala itu.

Khusus di Jawa Tengah, semua pemangku kepentingan tidak setuju dan menentang keras penggunaan isu SARA dalam Pilkada. Pendapat serupa dinyatakan perwakilan dari partai politik, yakni yang berasal dari PDIP, PKB, dan PKS. Potensi penggunaan isu SARA dalam Pilkada di Provinsi Jawa Tengah, menurut perkiraan kelompok pemangku kepentingan utama, masih sangat rendah. Namun mereka tidak menafikan isu SARA tetap akan digunakan oleh segelintir kelompok. Wakil dari PDIP Jawa Tengah memprediksi penggunaan isu SARA akan terjadi hingga 30 persen di wilayah tertentu seperti Solo Raya. Sementara itu akademisi dari Undip memperkirakan isu SARA akan



digunakan di wilayah dengan sebaran perkembangan kelompok populis yang tidak tercakup oleh NU dan Muhammadiyah, seperti Solo, Temanggung, Demak, Purbalingga, Magelang, Kebumen, Sukoharjo, Cilacap, Pati, dan Kudus.

Lantas, siapa aktor yang berpotensi menggunakan isu SARA dalam Pilkada di Jawa Tengah? Kelompok pemangku kepentingan menilai, aktor yang paling berpotensi menggunakan isu SARA adalah tim pasangan calon, partai politik, politikus, tim konsultan ahli, dan kelompok ormas. Aktor-aktor yang berpotensi menggunakan isu SARA dalam politik tersebut menggunakan media seperti media sosial yang diyakini sebagai sumber informasi utama dalam penyebaran isu SARA. Berikutnya adalah media konvensional seperti spanduk, pamflet, ataupun selebaran yang juga disebut sebagai penyebar informasi isu SARA di wilayah pinggiran.

Meskipun terdapat pendapat bahwa partai politik atau politikus berpotensi menggunakan politik SARA, perwakilan dari partai politik tetap menolak hipotesis tersebut. Namun parpol tidak menampik bahwa salah satu pertimbangan dalam pencalonan adalah kondisi sosial di daerah tersebut, di mana salah satu unsur yang diperhatikan adalah kelompok mayoritas pemilih. Kondisi sosial yang diperhatikan selalu dekat juga dengan soal kesamaan identitas.

Dengan kondisi seperti itu, langkah antisipatif dari Bawaslu terkait potensi penggunaan isu SARA dalam Pilkada harus dilakukan. Beberapa usulan langkah antisipasi yang harus dilakukan oleh Bawaslu adalah sebagai berikut :

- Kelompok pemangku kepentingan mendorong Bawaslu mengatur penggunaan media sosial dalam kampanye Pilkada dan Pemilu
- Bawaslu disarankan melakukan pendekatan terhadap



kelompok komunitas dari tingkat paling bawah untuk mencegah penggunaan politik SARA dalam Pilkada

2.4 Jawa Timur

Tidak berbeda dengan banyak pendapat di daerah lain, narasumber di Jawa Timur menyatakan pendapat tidak setuju politik SARA dijadikan sebagai strategi pemenangan politik. SARA mestinya ditempatkan sebagai basis kultural masyarakat yang *given* dan tidak untuk dipertentangkan, apalagi digunakan untuk membangun posisi kontra hitam-putih di tengah masyarakat. Hampir semua narasumber atau responden di Jawa Timur berpendapat bahwa politik SARA dipandang sebagai sesuatu yang bukan lahir dari masyarakat melainkan oleh elite politik.

Politik SARA sejatinya bukan hal baru di Indonesia. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, isu SARA masif dipertontonkan di ruang publik. Narasumber menilai yang terjadi di Jakarta merupakan barbarianisme politik. Meskipun demikian, disadari oleh para responden, isu SARA menjadi menemukan momentum besarnya di Jakarta karena Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menyentuh keyakinan dasar (kitab suci) umat Islam di mana Islam menjadi agama mayoritas di DKI Jakarta dan juga di Indonesia. Keteledoran Ahok tersebut kemudian dikapitalisasi sedemikian rupa sebagai bahan kampanye politik yang ditopang oleh berbagai kepentingan politik.

Potensi penggunaan isu SARA dalam Pilkada di Provinsi Jawa Timur dipandang sangat rendah. Syufianto ketua Bawaslu Jawa Timur menyatakan, potensi isu SARA di Jawa Timur memang ada, tetapi sangat rendah. Salah satu isu krusial terkait SARA di Madura dan Jawa Timur secara umum



adalah masih dipersoalkannya perempuan sebagai pemimpin. Bagi sebagian masyarakat, khususnya dari kalangan santri, perempuan dipandang tidak boleh memimpin dengan rujukan bersumber dari ajaran agama Islam. Selain itu, sebagian kecil warga di Jawa Timur, seperti di Madura, memiliki sensitivitas terhadap Muhammadiyah. Keberadaan kandidat yang berlatar Muhammadiyah mungkin akan berpotensi menyulut isu SARA dalam politik. Selain itu, di Sampang juga masih ada yang mempersoalkan pemilih yang menganut ajaran Syiah sehingga hal itu berpotensi menjadi masalah apabila ada kandidat berlatar Syiah. Informasi dari responden, konflik Syiah-Sunni di Madura terjadi di luar konteks Pilkada. Sekalipun demikian, dampak psikologi sosialnya tentu bisa mencekam masyarakat karena penduduk yang berafiliasi dengan Syiah tersebut sampai dipindahkan lokasinya ke Sidoarjo.

Konflik yang terjadi pada momentum Pilkada pernah terjadi di Tuban hingga aksi bakar-bakaran yang terjadi pada tahun 2006. Insiden tersebut tidak spesifik berkaitan dengan isu SARA, melainkan terkait dengan dugaan kecurangan pemilu. Saat itu, kantor KPU, pendopo Bupati, serta hotel dan rumah milik kandidat pemenang dibakar massa pendukung PDIP dan PKB.

Konflik serupa dengan yang terjadi di Tuban adalah kasus di Mojokerto pada tahun 2010 dengan motif ketidakpuasan salah satu kandidat yang dicoret oleh KPUD karena dinilai tidak memenuhi kriteria. Kerusakan terjadi di kantor DPRD Mojokerto, di mana massa membakar belasan mobil dinas ataupun pribadi. Kasus lain terjadi di Madura, di mana ada pemungutan suara ulang namun tidak ada yang berani menjadi petugas pemilihan karena diancam.

Kasus lain adalah pembakaran gereja di Situbondo pada



tahun 1990, pembakaran rumah Ketua PD Muhammadiyah dan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Situbondo dan Bondowoso pada tahun 2001. Pembakaran aset Muhammadiyah tersebut diakibatkan oleh peristiwa politik nasional, yaitu diturunkannya Presiden Abdurrahman Wahid yang dipahami massa akibat inisiasi tokoh Muhammadiyah Amien Rais.

Secara umum, konflik SARA dari aspek agama, suku, etnis, dengan latar pilkada di Jawa Timur belum pernah terjadi. Sekalipun demikian, pada beberapa daerah lain di Jawa Timur juga mencuat isu yang berpotensi menimbulkan konflik politik. Di sisi selatan Jawa Timur, ada yang biasa disebut dengan “botoh”; yang meski tidak ada hubungannya dengan pasangan calon atau masyarat, tetapi bisa mempengaruhi pemilu. Juga terdapat fenomena “blater” yang difungsikan untuk mempengaruhi pemilu di Madura. Responden memetakan pusatnya berada di Sampang, wilayah pantai utara Madura. Berikutnya, fenomena “begal” yang ada di masyarakat Lumajang; yang mana juga tidak ada hubungannya dengan pasangan calon, akan tetapi bisa mempengaruhi pemilu di wilayah tersebut.

Para aktor yang berpotensi menggunakan isu SARA dalam politik di Jawa Timur terdiri atas partai politik, konsultan politik, tim pemenangan non-parpol, *buzzer* media sosial, media massa, media sosial, dan tokoh agama yang berpaham fundamentalisme dan radikalisme yang eksklusif dalam jamaahnya. Selain itu juga terdapat aktor yang tergabung dalam kelompok di mana mereka tidak memiliki asosiasi organisasi keagamaan yang utama seperti Muhammadiyah dan NU, tidak berbadan hukum, dan keanggotaannya bisa sangat longgar. Kelompok terakhir ini juga dipandang bisa berpotensi menggerakkan dan mereplikasi diri dalam banyak kepentingan pada momen Pilkada Jawa Timur.

Informasi penyebaran isu SARA di ruang politik bisa



bersumber dari media sosial, media massa *mainstream*, pidato-pidato politik tokoh, mimbar agama di tempat tertentu, selebaran, dan pamflet politik. Terkait potensi parpol menggunakan politik SARA dalam pemenangan calon pada Pilkada, semua wakil partai politik menyatakan tidak melakukan politik SARA dalam pilkada. Kondisi itu bertentangan dengan fakta di lapangan, di mana saat Pilkada Gubernur Jawa Timur yang lalu masih ada yang mempersoalkan keberadaan perempuan sebagai pemimpin publik. Fakta pro-kontra boleh-tidaknya perempuan menjadi pemimpin tersebut adalah salah satu contoh bahwa di Jawa Timur pernah terjadi politik SARA dengan derajat yang relatif berbeda dengan daerah lain.

Langkah antisipasi dari Bawaslu Jawa Timur dalam upaya mengatasi persoalan politik SARA dalam pelaksanaan Pilkada adalah sebagai berikut:

- Indeks tingkat kerawanan oleh Bawaslu dikelola dengan baik.
- Pengawasan *money politic* dilakukan dengan baik.
- Literasi digital untuk membangun masyarakat literasi yang baik.
- Diet informasi yang liar, betul-betul menyaring mana informasi yang betul atau informasi yang sifatnya *hoax*.
- Panwaslu punya perangkat untuk mengamati media sosial.
- KPI mengawasi politik SARA dengan memperkuat UU Penyiaran dan kewenangan KPI/KPID.
- Bawaslu mengkampanyekan terus agar isu politik SARA atau lebih luas lagi politik identitas tidak digunakan.
- Survei potensi SARA secara komprehensif dan koordinasi



dengan Bawaslu dan KPU Jawa Timur serta pihak kepolisian.

- Menyiapkan dai yang berdakwah dengan santun dan menyejukkan.
- Harus ada semacam penguatan regulasi pemilu, misalnya Undang-Undang Pemilu menuju penguatan Bawaslu. Bawaslu tidak sekadar diberikan kewenangan untuk menindak administrasi pemilu, tetapi juga diberi kewenangan tambahan bersama Kepolisian akan adanya penindakan hukum yang bersifat pidana.
- Membangun kondisi yang kondusif, yang konstruktif bagi penyebaran wacana-wacana yang sehat dan rasional.
- Bawaslu dan kalangan masyarakat sipil, itu kemudian merangkul, misalnya *blogger* atau orang-orang yang aktif dan memiliki dukungan kuat di media sosial.
- Diperkuat ruang tradisi dalam berkomunikasi sosial.

2.5 Kalimantan Barat

Sekalipun narasumber sependapat untuk tidak setuju dengan penggunaan isu SARA dalam Pilkada, namun potensi penggunaan isu SARA dalam Pilkada Kalimantan Barat diakui cukup tinggi. Kalimantan Barat memiliki sejarah konflik antaretnis di masa lalu. Bahkan ada narasumber yang menyatakan bahwa terdapat semacam siklus konflik 20 atau 30-an tahun di daerah ini sejak tahun 1960-an. Di Kalimantan Barat pernah terjadi konflik SARA, khususnya konflik etnis yang terjadi beberapa kali. Yang terbesar terjadi pada tahun 1997, antara kelompok Dayak Melayu dengan kelompok Madura. Pada pelaksanaan pilkada, konflik bermotif SARA juga pernah terjadi. Pada Pilkada 2008



di daerah Kubu Raya, di mana terdapat salah satu calon yang pasangannya Muslim-non-Muslim, muncul ajakan untuk tidak memilih pemimpin yang beda agama di rumah-rumah ibadah.

Selama ini persoalan konflik di Kalimantan Barat lebih terkait dengan isu etnisitas ketimbang konflik agama. Sejak pelaksanaan pilkada secara langsung, terjadi semacam polarisasi kekuasaan serta pemusatan kekuasaan kepada kelompok etnis tertentu. Dua periode Pilkada yang dimenangi oleh calon yang beretnis Dayak berdampak pada penguasaan birokrasi dari kelompoknya sendiri. Meskipun secara umum relatif damai, terdapat semacam potensi ketegangan di tengah masyarakat terkait dengan persoalan etnis pada saat penyelenggaraan pilkada. Yang lebih dikhawatirkan adalah upaya dari pihak-pihak luar untuk mengadaptasi pola-pola politisasi SARA seperti yang terjadi di Jakarta untuk dilakukan di Kalimantan Barat.

Kekhawatiran lainnya adalah melebarnya potensi ketegangan yang selama ini didominasi isu-isu etnisitas menjadi isu agama. Beberapa waktu belakangan sudah mulai terlihat di masyarakat, hal-hal yang mengarah pada upaya memicu persoalan agama di Kalimantan Barat. Kehadiran kelompok-kelompok radikal serta tokoh-tokohnya dari luar Kalimantan Barat mempertegas kekhawatiran tersebut. Kekhawatiran yang lain adalah dugaan adanya elite-elite tingkat nasional yang ingin menjadikan wilayah Kalimantan Barat tidak aman. Ketegangan politik yang terjadi di pusat seperti bakal diadaptasi ke daerah-daerah rawan konflik seperti Kalimantan Barat.

Aktor yang berpotensi menggunakan isu SARA adalah elite politik, baik di tingkat lokal ataupun bahkan elite politik nasional. Mereka dianggap paling potensial untuk menggunakan isu SARA untuk kepentingan politiknya serta memicu konflik yang lebih luas di masyarakat. Peran dari elite politik tersebut di Kalimantan



Barat sangat besar dalam memunculkan atau meredam isu-isu politisasi SARA. Hal ini dikarenakan karakteristik masyarakat yang masih patrimonial sehingga mudah terpengaruh oleh apa yang dilakukan oleh para elite. Jika para elite politik tergoda untuk menggunakan isu SARA untuk kepentingan politik dan kemenangan pilkada, besar kemungkinan akan terjadi konflik di tingkat masyarakat.

Kehadiran kelompok ormas kurang toleran bisa semakin menambah masalah dari potensi konflik yang sebelumnya sudah ada. Kemungkinan para pasangan calon dan tim kampanyenya menggunakan isu SARA cukup terbuka mengingat isu ini dianggap mudah dan murah untuk menggerakkan masyarakat. Sumber informasi penyebaran isu SARA di Kalimantan Barat di antaranya melalui mimbar keagamaan, pertemuan adat, media konvensional, serta media sosial yang masif dan isunya sulit untuk di-*counter*.

Sementara itu, perwakilan partai politik menampik potensi parpol menggunakan politik SARA dalam kemenangan calon pada Pilkada. Narasumber dari partai politik menyatakan tidak akan menggunakan isu SARA dalam Pilkada karena efeknya yang dinilai merusak. Dalam penentuan pasangan calon, sebagian besar partai politik menyatakan tidak menjadikan persoalan SARA sebagai pertimbangan utama. Popularitas dan elektabilitas menjadi dasar pertimbangan selain faktor ideologi dan juga logistik. Hanya PPP yang secara terang-terangan menyatakan tidak mungkin mengajukan calon non-Muslim karena tidak sesuai garis partai Islam.

Dalam kondisi tingginya potensi penggunaan isu SARA dalam Pilkada Kalimantan Barat, antisipasi dari Bawaslu untuk penggunaan isu SARA harus dilakukan dengan menjalankan langkah-langkah sebagai berikut:



- Sosialisasi kepada para tokoh etnis dan agama.
- Sosialisasi kepada masyarakat umum untuk mengajak agar menjaga kondusivitas pilkada.
- Kelompok pemangku kepentingan mendorong Bawaslu mengatur penggunaan media sosial dalam kampanye Pilkada dan Pemilu

2.6 Sulawesi Utara

Konflik SARA dalam skala besar relatif tidak pernah terjadi di Sulawesi Utara. Konflik SARA pernah terjadi sekitar tahun 1970-an, namun tidak mengemuka dan membesar. Saat itu pedagang dari Gorontalo datang ke Manado, kemudian ada perlawanan dari warga yang lebih dulu tinggal. Konflik yang terjadi berlatar etnisitas atau suku.

Pada tahun 2018, Sulawesi Utara tidak menyelenggarakan pemilihan gubernur, namun menyelenggarakan pemilihan bupati dan walikota di 6 kabupaten/kota. Sebagian besar pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Utara tidak menyetujui penggunaan isu SARA dalam pilkada. Namun mereka tidak menampik bahwa ada dorongan pribadi memilih sesuai identitas, hanya saja jangan sampai isu SARA ini ditunggangi untuk kepentingan politik. Sebagian besar pemangku kepentingan menilai, kecil kemungkinan ada penggunaan isu SARA dalam Pilkada di Sulut. Namun tetap tidak menafikan ada kemungkinan isu SARA akan digunakan oleh segelintir kelompok orang. Secara normatif partai politik menegaskan tidak akan menggunakan isu SARA dalam kemenangan calon di kontestasi pilkada. Namun perwakilan parpol tidak menampik bahwa penyelenggara pemilu harus memperhatikan suara kelompok mayoritas.



JPPR memandang politik SARA akan digunakan oleh konsultan politik pasangan calon. Perwakilan KPID memandang bahwa oknum yang melihat bahwa penggunaan politik SARA jitu untuk memenangkan calon tertentu, kemungkinan akan menggunakan politik SARA juga. Namun upaya tersebut akan dimainkan oleh tim pemenangan, bukan langsung oleh calon. Sementara perwakilan Partai Golkar memandang bahwa ada pihak yang menilai bahwa penggunaan politik identitas merupakan terobosan untuk memenangkan calon dengan berbagai cara dan hal itu merupakan konsekuensi pemilihan langsung. Dari berbagai uraian narasumber di Sulawesi Utara, aktor yang berpotensi menggunakan isu SARA adalah tim pasangan calon dan organisasi adat.

Sumber informasi penyebaran isu SARA dalam ruang politik terdiri atas:

- Media sosial;
- Media online, terutama media yang tidak memiliki badan hukum yang dinilai potensial digunakan sebagai wadah penyebaran isu SARA;
- Media konvensional, seperti spanduk, pamflet, dan selebaran yang juga disebut sebagai penyebar informasi isu SARA di wilayah kepulauan

Antisipasi dari Bawaslu untuk penggunaan isu SARA dalam Pilkada dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

- Bawaslu mengatur penggunaan media sosial dalam kampanye Pilkada dan Pemilu.
- Bawaslu diminta menggunakan teknologi informasi (IT) untuk menangkal dan memfilter isu SARA secara otomatis.



- Bawaslu disarankan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk meredam isu SARA.
- Bawaslu didorong membuat nota kesepahaman dengan pemangku kepentingan seperti KPI dan Dewan Pers untuk mencegah penyebaran provokasi SARA melalui media massa
- Bawaslu diminta bergerak cepat mengidentifikasi calon yang maju dalam Pilkada. Jika yang maju adalah tokoh agama, Bawaslu harus segera mewaspadai orang-orang yang berada di belakang calon

Berdasarkan penelitian terkait politik SARA di enam provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara; diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut.

Semua pemangku kepentingan yang dijadikan informan atau responden penelitian ini memahami dengan baik tentang definisi SARA. Pada umumnya pemahaman tentang SARA senantiasa dihubungkan dengan identitas keagamaan, suku, ras, etnis, warna kulit, atau golongan kelompok tertentu seperti aliran kepercayaan dan ikatan solidaritas seperti kelompok organisasi massa.

Hampir semua pemangku kepentingan dalam penelitian ini bersepakat bahwa penggunaan politik SARA dalam kontestasi demokrasi bukanlah sebuah pilihan yang bijak. Identitas SARA yang melekat pada diri setiap warga negara adalah sebuah anugrah Tuhan yang patut dijaga, dan dihormati. Bukan pada tempatnya pula satu entitas identitas menegasikan entitas lainnya.

Pada tataran empiris, sebenarnya isu SARA bukanlah realitas politik baru di tanah air. Namun fenomena Pilka-



da DKI Jakarta dipandang sebagai pengalaman pahit yang luar biasa mengganggu kohesivitas kehidupan masyarakat karena politik SARA begitu masif tersebar.

Politik SARA muncul dilatari oleh beberapa faktor, di antaranya:

- a) Adanya ketimpangan sosial-ekonomi di masyarakat sehingga identitas dijadikan faktor determinan;
- b) Rekayasa elite politik untuk memperoleh kemenangan politik;
- c) Adanya pemahaman yang belum tuntas soal bagaimana menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas;
- d) Adanya *blunder*/kecerobohan individu atau politikus tertentu dalam berkomunikasi yang menyinggung psikologi sosial massa; dan
- e) Faktor media massa dan media sosial.

Politik SARA menjadi sangat masif dan menyebar ke ruang publik karena diproduksi dan dikapitalisasi oleh elite politik seperti konsultan politik, anggota partai politik, tim sukses, dan elite ormas tertentu sehingga memberikan dampak ketegangan sosial di masyarakat. Kemajuan teknologi berupa media sosial, media elektronik turut menopang masifnya politik SARA pada Pilkada DKI Jakarta. Disadari bahwa kecepatan perubahan teknologi tidak diiringi oleh kesadaran literasi yang baik pengguna teknologi komunikasi media.

Potensi penggunaan SARA bergantung kepada komposisi pasangan calon, latar belakang dan profil pasangan calon, strategi kampanye partai politik pendukung dan tim kampanye,



serta pemberitaan dan perbincangan di media sosial. Tinggi-rendahnya potensi SARA dalam pilkada bergantung kepada partai politik, pasangan calon, dan tim kampanye dalam strategi kampanyenya. Faktor lainnya, tingginya-rendahnya penggunaan politik SARA bergantung pada tinggi rendahnya perbincangan SARA dalam media dan media sosial dalam tahapan kampanye.

Dari keenam provinsi yang diteliti tersebut, Kalimantan Barat dan Jawa Barat adalah provinsi yang paling rentan dalam hal potensi penggunaan isu SARA dalam proses penyelenggaraan pilkada. Kalimantan Barat memiliki pengalaman yang panjang terkait dengan konflik antar-identitas suku yang cukup tinggi. Demikian juga Jawa Barat terdapat potensi penggunaan SARA dalam proses Pilkada dengan melihat komposisi dan latar belakang para calon gubernur dan wakil gubernur. Pengalaman Jawa Barat terhadap pandangan agama, budaya, dan komunisme berpotensi berpengaruh terhadap Pilkada. Selebihnya, keempat provinsi lainnya memiliki derajat yang sepadan dalam potensi penggunaan SARA dalam penyelenggaraan pilkada.

Potensi penggunaan isu SARA di Pilkada Tahun 2018 secara umum dipandang relatif rendah. Faktor rendahnya potensi itu didasari oleh pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kontestasi pilkada di enam daerah tersebut tidak memiliki variabel dominan yang berhubungan dengan SARA seperti kasus DKI di mana ada keteledoran salah satu kandidat, dan kuatnya tarikan kepentingan politik di situ;
- b. Kontestasi di daerah relatif bisa dikelola oleh pemangku kepentingan mengingat masih kuatnya peran ormas dan komunikasi informal lainnya.



Meskipun potensi politik SARA dinilai rendah, semua pihak menyadari bahwa antisipasi dan upaya pencegahan tetap harus dilakukan oleh berbagai pihak. Semua partai politik menyatakan tidak mempertimbangkan faktor identitas sebagai faktor penentu calon kepala daerah. Pertimbangan utama adalah pada popularitas, elektabilitas, *track record*, atau integritas calon, juga komitmen yang dibangun untuk memenangkan partai politik pada Pemilu Anggota Legislatif. Selain itu, faktor kearifan lokal juga menjadi pertimbangan partai politik.

Atas kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, saran dan rekomendasi yang muncul berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu/Panwaslu dituntut lebih tanggap dalam mengatur aturan permainan (*rule of the game*) pemilu agar peristiwa di Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak terjadi di tempat lain.
2. Untuk menopang rekomendasi pertama, Bawaslu diberikan kewenangan yang lebih *rigid* dan jelas untuk menindak pelanggaran pemilu yang berhubungan dengan SARA.
3. Bawaslu secara khusus diminta melakukan terobosan hukum agar menyiapkan payung hukum sehingga politik SARA tidak lagi merebak pada agenda kontestasi politik berikutnya.
4. Penguatan undang-undang penyiaran diperlukan untuk menguatkan fungsi KPI dan KPID dalam mengawasi keberlangsungan media di Indonesia. Selain itu KPI dan KPID didorong untuk melakukan pendidikan literasi yang baik.
5. Penyelenggara pemilu diminta untuk mengkonsolidasikan komunitas media alternatif seperti para *blogger* untuk



- melakukan *counter* terhadap politisasi isu SARA yang berkembang di tengah kehidupan politik masyarakat.
6. Inisiasi banyak pihak untuk melakukan agenda strategis seperti dialog, koordinasi, dan penyadaran untuk bernegara dan berbangsa sesuai dasar Pancasila dan UUD 1945 di semua basis masyarakat sangat diperlukan.
 7. Peran ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah, di samping ormas keagamaan dan ormas sosial lain, sangat diperlukan untuk menyuburkan cara beragama dan cara bersosialisasi di tengah masyarakat dengan mengedepankan komunikasi dan sikap yang *tasamuh*, moderat, dan inklusif sebagai manifestasi perwujudan cita-cita luhur bangsa.
 8. Partai politik diminta untuk melakukan pendidikan politik yang baik sehingga terjadi realitas politik yang santun dan berkeadaban.
 9. Perlu upaya mengawasi kinerja tim ahli konsultan politik serta lembaga survei agar terbangun kebijakan politik yang menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi di tengah masyarakat.

LAMPIRAN 1

PANDUAN PERTANYAAN

Panduan Materi FGD

Materi FGD terdiri atas dua pertanyaan kunci, yang intinya adalah menggali pendapat dan sikap peserta FGD perihal berikut: (1) pemetaan keberpihakan terhadap isu SARA dari para tokoh/aktor strategis yang mewakili berbagai unsur; dan (2) pemetaan langkah antisipasi terhadap kemungkinan penggunaan isu SARA dalam pelaksanaan pilkada di daerahnya.

Panduan materi FGD adalah sebagai berikut:

Variabel	Pertanyaan Kunci	Pertanyaan Lanjutan
Keberpihakan terhadap isu SARA	<i>Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang penggunaan isu SARA dalam Pilkada DKI Jakarta yang lalu?</i>	<ul style="list-style-type: none">• Apakah Bapak/Ibu setuju atau tidak setuju terhadap penggunaan isu SARA untuk memengaruhi pilihan politik pemilih?• Menurut Bapak/Ibu, apakah politisasi isu SARA seperti di Pilkada DKI Jakarta berpotensi digunakan pada pilkada di provinsi ini? Jika ya, kira-kira mengapa? Jika tidak, mengapa di daerah ini isu SARA tidak digunakan?• Bisakah Bapak/Ibu memetakan siapa saja pelaku/aktor di daerah ini yang berpotensi menggunakan atau mempolitisasi isu SARA dalam pilkada?• Bagaimana potensi isu SARA digunakan pada pilkada di daerah ini? Bisakah Bapak/Ibu memberikan penilaian potensinya tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan pengalaman pemilu dan pilkada sebelumnya di daerah ini?• Jika potensinya di daerah ini tinggi, kira-kira melalui sumber-sumber apa saja isu SARA itu dapat meluas di masyarakat?
Langkah antisipasi kemungkinan penggunaan isu SARA dalam pilkada	<i>Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang langkah-langkah antisipasi yang perlu diambil untuk mencegah penggunaan isu SARA dalam pilkada di daerah ini?</i>	<ul style="list-style-type: none">• Apakah di daerah ini pernah terjadi konflik berbasis SARA? Jika pernah, bagaimana penyelesaian konfliknya?• Menurut Bapak/Ibu, bagaimana langkah antisipasi yang perlu dilakukan Bawaslu untuk mencegah berkembangnya politisasi isu SARA dalam kampanye pilkada?



Pedoman Wawancara Mendalam

Informan	Pertanyaan
Ketua DPD Partai Politik	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="361 342 1119 402">1. Apakah latar belakang SARA menjadi pertimbangan dalam menentukan pasangan calon untuk daerah ini?<li data-bbox="361 411 1119 502">2. Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan SARA untuk kampanye memenangkan pasangan calon yang diusung oleh parpol Bapak/Ibu?<li data-bbox="361 511 1119 575">3. Siapakah figur-figur yang sudah didekati oleh parpol Bapak/Ibu dan kenapa?



LAMPIRAN 2

NARASUMBER DAN/ATAU RESPONDEN

No-mor	Provinsi dan Nama Responden	Lembaga
1	Sumatra Utara	
	Jefrizal	(Pegiat Pemilu JPPR)
	Firdaus Hutasuhur	Kesbangpol Provinsi Sumatra Utara
	Indra Fauzan	Akademisi Universitas Sumatra Utara
	Rurita Ningrum	LSM FITRA Sumut
	Masana	Kasubbag Analisis Dit.Intelkam Polda Sumut
	Adrian Harahap	KPID Sumut
	Yulhasni	KPUD Sumut
	Jumiran Abdi	Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai DPD PDIP Sumut
	Daudsyah Munthe	Sekretaris Pembina DPD Partai Golkar Sumut
2	Jawa Barat	
	Alan Barok	JPPR
	Dadang Sudardja	KIPP Jabar
	Alan	Akademisi Unjani
	Deden Fardah	KPID Jawa Barat
	Abu Redran	KPU Provinsi Jabar
	Rifqi Ali Mubarak	KPU Kota Bandung
	Achmad Antony	Bakesbangpol Jabar
	Rahim	Wartawan Pikiran Rakyat
	Euis Siti Julaeha S.	Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Jabar
	Kustini	Himpunan Wanita Diffable Indonesia (HWDI) Jabar
	Ahmad S. Ridwan	Polda Jawa Barat
	Saan Mustopa	Ketua DPW Nasdem Jawa Barat
	Dwi Putro Aries Wibowo	DPD PDI Perjuangan
	Iwan Sunandjaya	Ketua DPW Partai Demokrat Jawa Barat
	Abdul Hadi Wijaya	Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Barat



3	Jawa Tengah	
	Sri Handoko	KPU Karang Anyar
	M Yulianto	Sosiolog FISIP UNDIP
	Masnuah	LBH Apik
	Hanum	LBH Apik
	Teguh Yuwono	FISIP UNDIP
	Yani	KPU Temanggung
	Hakim	KPU Jateng
	Djoko Haryono	Kesbangpol
	Fajar Saka	Dosen Fak.Hukum STIKUBANG SEMARANG
	M Khanafi	KPU Kudus
	Sukartono	KPU Kab Tegal
	Amri	LSM Pattiro Semarang
	Tia	Harian Wawasan
	Aries	Radio Idola
	Edi Purwanto	Intelkam Polda Jateng
	Shadu	Bawaslu Jateng
	Drs. H. Tafsir, M.Ag	Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah
	Nur Shoib, S.H., M.H	Wakil Sekretaris PWNU Jateng
	Nunik Sriyuningsih	Wakil Ketua DPD PDIP Jateng, Ketua Fraksi PDIP di DPRD Jateng
	Sukirman	Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB, Wakil Sekretaris DPW PKB Jateng
	Hadi Santoso, ST., MT	Ketua Bidang Humas DPW PKS Jateng, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng
4	Jawa Timur	
	DR. Sufiyanto	Ketua Bawaslu Propinsi Jawa Timur
	Sri Sugeng Pujiatmoko	Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur
	Eko Sasmito	Ketua KPU Jawa Timur
	Mohammad Muzakir, MA.	Sosiolog Universitas Negeri Surabaya
	Awam Dharmawan	Pakar Komunikasi Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
		KPID Jawa Timur
	Eddy Marzuki	Surabaya Survey Centre
	Najib	Lembaga Pemantau Pemilu JPPR
	AFNI	PW Nasyiatul 'Aisyiah Jawa Timur
	Dewi Hayu Sinta	Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur
	Doni Kurniawan	Intelkam Polda Jawa Timur



	Tulus	Bakesbangpol Jawa Timur
	Aina Amalia	Fatayat NU Jawa TImur
	Airlangga Pribadi, PHD	Ilmu Universitas Airlangga
	Prof. Dr. Hotman Siahaan	Sosiolog Universitas Airlangga
	Dr. Kris Nugroho	Ilmuwan Politik Universitas Airlangga
	Prof Dr. Muzaki	PW NU Jawa Timur
	Hari Putri Lestari, MH	Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur
	Abdul Halim Iskandar	Ketua DPD Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur
	H Renville Antonio	Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur
	Hadinuddin	Bendahara Partai Gerindra Jawa Timur
5	Kalimantan Barat	
	Krissantus Heru Siswanto	Pimpinan Bawaslu Kalbar
	Glorio Sanen	LIPD
	Kristianus Atok	Ilmuwan sosial Universitas Tujuh Belas Agustus
	Abdul Latif	KPU Kota Pontianak
	Dr Djumadi	Ilmuwan Politik Universitas Tujuh Belas Agustus
	Darwis	JPPR
	Gustiar	KPU Kabupaten Kubu Raya
	Umi Rifidiyawaty	KPU Provinsi Kalbar
	Zulfidar Zaidar	Sekretaris MABM
	Mustafa MS	Partai Golkar
	Fran Asok	Tokoh adat Dayak (AMAR)
	Maskendari	PDI Perjuangan Kalbar
	Hendri Makaluas	DPD Gerindra Kalbar
	Holdy	DPW PPP
	Suroso	Tribun Pontianak
	AKBP Wedy Mahadi	Polda Kalbar
	Faisal	JARI
	Fubertus Ipur	Elpagar
	MS Budi	KIPD Prov Kalbar
6	Sulawesi Utara	
	Herwyn J. H. Malonda SH. MPd	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
	Johnny A. A. Suak, SE. Msi	Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
	DR. Flora Kalalo, SH., MH	Wakil Rektor/ Akademisi Hukum Universitas Sam Ratulangi



H. Syaban Mauluddin S.PD.I, M.Pd.I	Ketua PW Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara
AKBP Liston Bangkang	Dit. Intel. Polda Sulawesi Utara
Cesylya Saroinsong	Pemimpin Redaksi Manado post
Pdt. Janny Rende, M.Th	Wakil Sekretaris Umum Sinode GMIM
Reidy Sumual	KIP Sulawesi Utara
Yoseph Ikanubua	Perwakilan PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) Sulawesi Utara
Taufiq	Perwakilan DPD IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Sulawesi Utara
Melky Pangenanan	Perwakilan GAMKI Sulawesi Utara
Rahmat Machmud	Perwakilan PMII Provinsi Sulawesi Utara
Fahrudin Noh	KPU Sulawesi Utara
Syahrul Setiawan	JPPR Sulawesi Utara
Dr. Maria Henny Pratikno	Akademisi Antropologi Universitas Sam Ratulangi
Fahrudin Noh	KPU Daerah Sulawesi Utara
Syahrul Setiawan	JPPR Sulawesi Utara
Salman Saelangi	Ketua PW Muhammadiyah Sulawesi Utara
Filip M.	Manado Post
Lucky Senduk	Ketua Bapilu Partai DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara
Audy Malonda	Pemangku Adat Minahasa Sulawesi Utara
Victor Rompas	Ketua Bapilu Partai Golkar DPD Sulawesi Utara
Erick Kawatu	Anggota KPID Sulawesi Utara

